



RENSTRA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Tahun 2025-2029



bappendabogorkab



bappenda_kabbogor



bappendakabbogor



bappendajuara



**BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan harus ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor beserta nomenklatur perubahannya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang perencanaan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah penanggung jawab urusan perencanaan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

10. Rencana ...

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
20. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan Profil pembangunan Daerah.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan Daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui Program pembangunan Daerah tahunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

- a. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
- b. Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029; dan
- c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2025 dan Renja PD tahun 2026-2030;

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (3) Kepala Badan atau sebutan lainnya melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan dari Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.

Bagian Kedua

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.
- (3) Kepala Badan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB V ...

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

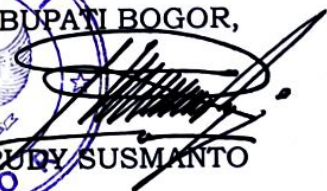
- (1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPJMD dan RKPD.
- (2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2025


BUPATI BOGOR,

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



AJAT ROCHMAT JAINIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, huruf c, untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disamping merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor setiap tahunnya selama periode perencanaan 5 Tahun, juga menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga tahun 2029 mendatang. Untuk itu, dokumen ini penting disusun untuk terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat daerah dengan perencanaan di lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah memberikan masukan berharga dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah serta dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk Terwujudnya Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang berlandaskan Iman dan Takwa.

Cibinong, 29 September 2025

Kepala


ADI MULYADI, S.H, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19770110 200501 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR	15
2.1. Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	15
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	15
2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	25
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	30
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappenda	82
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	82
2.2.1 Permasalahan	82
2.2.2 Isu Strategis	84
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	87
3.1. Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029	87
3.2. Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029	88
3.3. Arah Kebijakan Bappenda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappenda Tahun 2025-2029	92
3.4. Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappenda Tahun 2025- 2029	96

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	102
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	102
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	118
BAB V PENUTUP	121
LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Analisis Ketersediaan Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	28
TABEL 2.2	Analisis Ketersediaan Jabatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	28
TABEL 2.3	Aset atau Modal Pendukung Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	29
TABEL 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024	31
TABEL 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappenda Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024	79
TABEL 2.6	Perumusan Isu Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	86
TABEL 3.1	Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029	91
TABEL 3.2	Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	93
TABEL 3.3	Prioritas Pembangunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Penahapan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	101
TABEL 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	104
TABEL 4.2	Rencana Program/Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029 Bappenda	110
TABEL 4.3	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	119
TABEL 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	120

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	17
GAMBAR 2.2	Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas A pada Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	23
GAMBAR 2.3	Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Golongan	26
GAMBAR 2.4	Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
GAMBAR 2.5	Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	27

LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan:

- (1) Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (3) Penyesuaian Rancangan Awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai hasil konsultasi publik RPJMD;
- (4) Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- (5) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- (6) Verifikasi Rancangan Renstra PD;

- (7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (8) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029;
- (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
- (10) Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2025 serta Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2026 sampai dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat terwujud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);\
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);\
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129).
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 134);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101).

40. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 97).
41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;
2. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disajikan dalam 7 (Tujuh) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, fungsi Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Disamping itu, menjelaskan pula terkait alasan Renstra akibat kebijakan nasional.

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai.

Tujuan disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.4 Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

2.1. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Bappenda

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan ringkas tentang jenis sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan :

- a. target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan tahun 2020- 2024.
- b. Capaian program-program yang telah dilaksanakan tahun 2020 s.d 2024 dengan indikator kinerja yang telah ditentukan.
- c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Menyajikan pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Sampai kepada jenias layanan yang diberikan berdasarkan kelompok sasarannya. Selanjutnya juga menyajikan Mitra kerja Bappenda yang mendampingi dan memperkuat pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap Masyarakat Luas.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Menguraikan permasalahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang masih belum diselesaikan hingga tahun 2024, berupa :

- a. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah
- b. Permasalahan kekinian yang muncul
- c. Permasalahan belum terlaksananya kewenangan
- d. Permasalahan belum terlaksananya mandatory kebijakan pusat dan provinsi Jabar
- e. Permasalahan yang terkait dengan hasil evaluasi KLHS
- f. Permasalahan lainnya yang perlu diuraikan

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan Kewenangan Bappenda.

Hasil peninjauan ulang/review faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi Jawa Barat ;
 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

Penyajian seluruh bagian ini merupakan hasil analisis yang tertuang dalam tabel 2.4

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029

Menguraikan Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan daerah dalam periode Renstra Tahun 2025-2029 yang diturunkan dari Sasaran Daerah yang diampu oleh Bappenda sesuai dengan kewenangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

3.2. Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029

Menguraikan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu merupakan kinerja yang diturunkan dari tujuan Perangkat Daerah, serta memperhatikan hal-hal apa saja atau indikator apa yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut melalui sasaran yang disusun.

3.3 Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Menguraikan strategi berupa rencana tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah Bappenda dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dengan

mempertimbangkan SDM, fokus, dan pentahapan (waktu/tahun pelaksanaan), sehingga bisa terimplementasi dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.4 Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Menguraikan langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan kewenangan Bappenda, serta selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Menguraikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator, target kinerja serta kebutuhan anggaran tahun rencana (2025-2030). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIPD, serta digunakan berdasarkan cascading, mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output (kinerja) disajikan dalam tabel 4.2 sebagaimana terlampir.

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Menguraikan IKU yang disajikan yaitu IKU tujuan dan sasaran Bappenda. IKK merupakan kinerja yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja bidang urusan (outcome program, dan output kegiatan).

BAB V PENUTUP

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya dokumen Renstra untuk menjadi pedoman penjabaran Renja setiap tahunnya mulai tahun 2025-2030.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

2.1. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor melakukan pelayanan terhadap masyarakat yaitu wajib pajak sesuai dengan objek pajak masing-masing, Adapun jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diantaranya Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), PBB P2, BPHTB, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Jasa Perhotelan, Makan dan/ atau Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Tenaga Listrik, Jasa Parkir).

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :

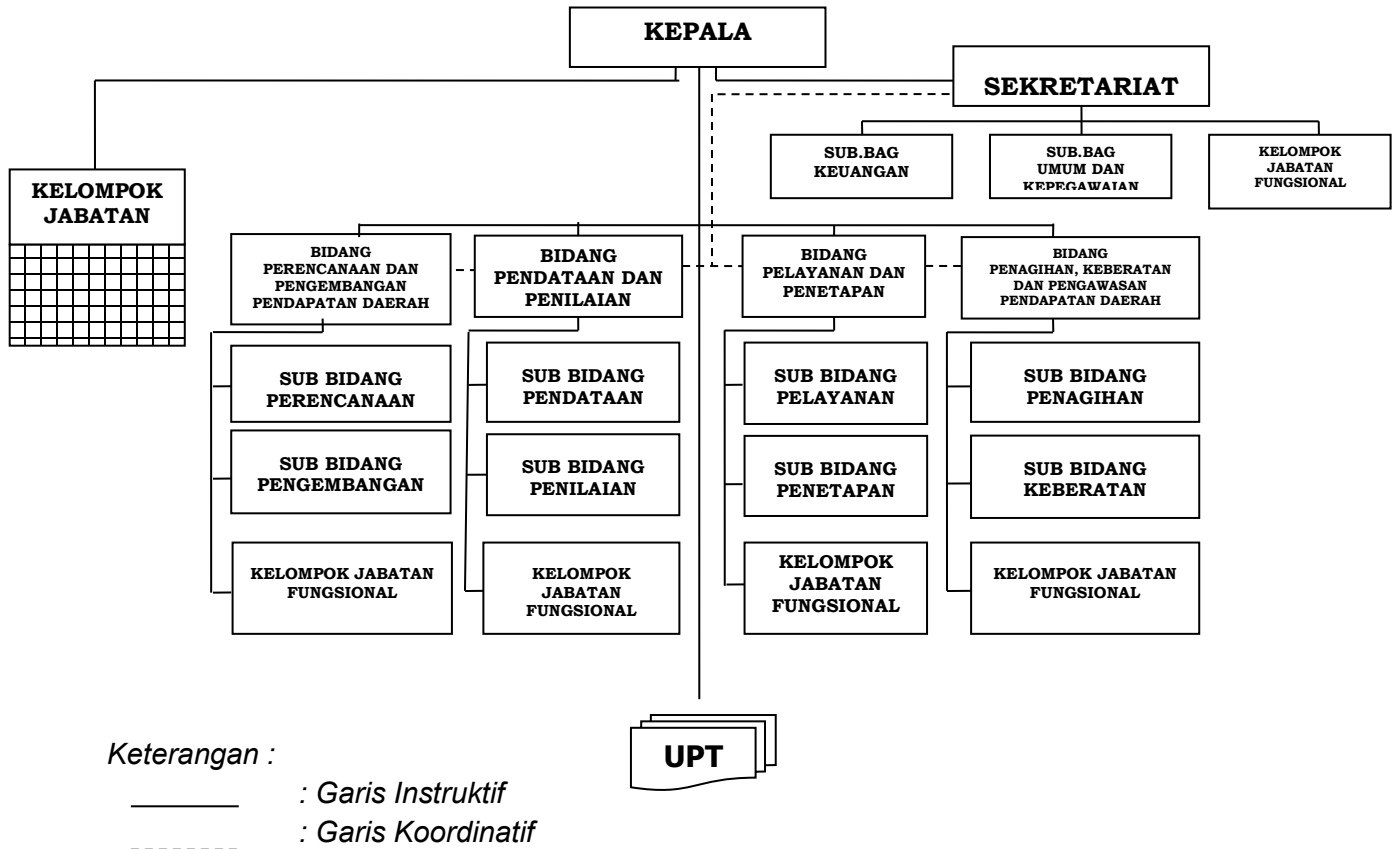
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Substansi Program dan Pelaporan);
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan;
 2. Sub Bidang Pengembangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Substansi Pengelolaan Sistem Informasi).
- d. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Penilaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Substansi Pengolahan Data).
- e. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan;
 2. Sub Bidang Penetapan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Substansi Verifikasi)
- f. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Keberatan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Substansi Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah.

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1 dibawah ini :



Sumber : Perbup SOTK Bappenda No.110 Tahun 2020

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- penyusunan kebijakan penataan organisasi organisasi Badan;
- pengelolaan keuangan Badan;
- pengelolaan situs web Badan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Substansi Program dan Pelaporan);

2. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- c. analisis potensi Pajak Daerah;
- d. penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah;
- e. perencanaan pengelolaan Pajak Daerah;
- f. penyusunan produk hukum Pajak Daerah;
- g. analisis kebijakan dan pengembangan Pajak Daerah;
- h. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah;
- i. pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- j. penyusunan perjanjian kerjasama di bidang Pajak Daerah;
- k. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Perencanaann;
- 2) Sub Bidang Pengembangan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Substansi Pengelolaan Sistem Informasi).

3. BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN

Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pendataan dan pendaftaran, penilaian dan pengolahan data Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pendataan dan Penilaian;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah, penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
- d. pendaftaran objek pajak dan Wajib Pajak;
- e. penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- f. pemutakhiran data Pajak Daerah;
- g. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- h. pemeliharaan data Pajak Daerah;
- i. pengadministrasian dokumen pelayanan dan pendaftaran Wajib Pajak;

- j. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pendataan dan Penilaian;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Pendataan;
- 2) Sub Bidang Penilaian;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Substansi Pengolahan Data).

4. BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN

Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan Wajib Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan Pajak Daerah;
- c. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
- d. penelitian dan verifikasi data Pajak Daerah;
- e. penetapan Wajib Pajak Daerah;
- f. penetapan Pajak Daerah;
- g. pengoordinasian pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
- h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Pelayanan;
- 2) Sub Bidang Penetapan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Substansi Verifikasi).

5. BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis penagihan, penyelesaian keberatan Pajak Daerah serta pengawasan Pendapatan Daerah;
- c. penagihan Pajak Daerah;
- d. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah;
- e. penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- g. evaluasi administrasi pelayanan Retribusi Daerah;
- h. Pengolahan data Bagian Desa dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Penagihan;
- 2) Sub Bidang Keberatan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Substansi Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah).

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

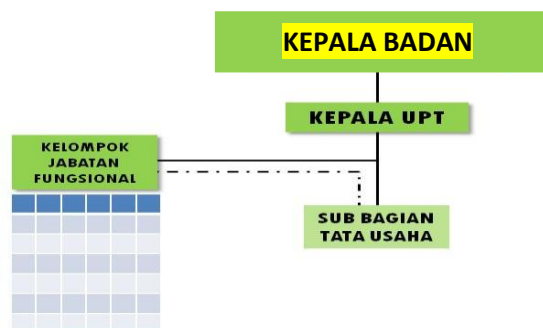
Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- b. penyusunan dan penyampaian data potensi dan objek pajak daerah;
- c. penghitungan target pajak daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
- e. pengadministrasian penerimaan pajak dan piutang pajak;
- f. pelaksanaan dan pengadministrasian pendistribusian dokumen pajak;
- g. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- h. pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- i. penyampaian berkas permohonan wajib pajak yang dinyatakan lengkap kepada Kepala Badan;
- j. pelaksanaan verifikasi lapangan;
- k. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak;
- m. pelaksanaan identifikasi piutang pajak daerah dengan pengecekan lapangan;
- n. pelaksanaan pendataan teknis penilaian individu;
- o. menerbitkan surat himbauan, teguran 1 (satu) dan teguran 2 (dua);

- p. pelaksanaan pendataan, penerbitan surat pengantar untuk penerbitan SKPD atau surat pemberitahuan objek pajak, dan pelaksanaan rekonsiliasi data perijinan reklame jenis spanduk, umbul-umbul dan reklame dalam ruang;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud sebelumnya dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagan struktur organisasi UPT seperti yang tersaji dalam Gambar 2.2. berikut :



Sumber : Perbup SOTK Bappenda No.101 Tahun 2020

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

1. KEPALA UPT

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah pada UPT.

2. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan

ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum UPT;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pajak Daerah Kelas A pada Badan, yang terdiri dari:

- a. UPT Pajak Daerah Sukaraja, meliputi :
 1. Kecamatan Sukaraja; dan
 2. Kecamatan Babakan Madang.
- b. UPT Pajak Daerah Gunung Putri, meliputi :
 1. Kecamatan Gunung Putri; dan
 2. Kecamatan Cileungsi.
- c. UPT Pajak Daerah Jonggol, meliputi:
 1. Kecamatan Jonggol;
 2. Kecamatan Cariu;
 3. Kecamatan Tanjungsari;
 4. Kecamatan Sukamakmur; dan
 5. Kecamatan Klapanunggal.
- d. UPT Pajak Daerah Parung, meliputi :
 1. Kecamatan Parung;
 2. Kecamatan Kemang;
 3. Kecamatan Gunung Sindur;
 4. Kecamatan Rumpin;
 5. Kecamatan Ciseeng; dan
 6. Kecamatan Rancabungur.
- e. UPT Pajak Daerah Ciawi, meliputi :
 1. Kecamatan Ciawi;
 2. Kecamatan Cisarua; dan
 3. Kecamatan Megamendung.
- f. UPT Pajak Daerah Caringin, meliputi :
 1. Kecamatan Caringin;
 2. Kecamatan Cigombong;
 3. Kecamatan Cijeruk.

- g. UPT Pajak Daerah Citeureup, meliputi :
 - 1. Kecamatan Cibinong;
 - 2. Kecamatan Citeureup;
 - 3. Kecamatan Tajurhalang; dan
 - 4. Kecamatan Bojonggede.
- h. UPT Pajak Daerah Ciomas, meliputi :
 - 1. Kecamatan Ciomas;
 - 2. Kecamatan Dramaga;
 - 3. Kecamatan Taman Sari; dan
 - 4. Kecamatan Ciampea.
- i. UPT Pajak Daerah Cigudeg, meliputi :
 - 1. Kecamatan Cigudeg;
 - 2. Kecamatan Sukajaya;
 - 3. Kecamatan Jasinga;
 - 4. Kecamatan Tenjo; dan
 - 5. Kecamatan Parung Panjang.
- j. UPT Pajak Daerah Leuwiliang, meliputi :
 - 1. Kecamatan Leuwiliang;
 - 2. Kecamatan Leuwisadeng;
 - 3. Kecamatan Nanggung;
 - 4. Kecamatan Cibungbulang;
 - 5. Kecamatan Pamijahan; dan
 - 6. Kecamatan Tenjolaya.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Adapun kelompok jabatan fungsional yang seharusnya terpenuhi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Penilai Pajak, Juru Sita, dan Pemeriksa Pajak.

2.1.2 SUMBER DAYA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

A. SUMBER DAYA MANUSIA

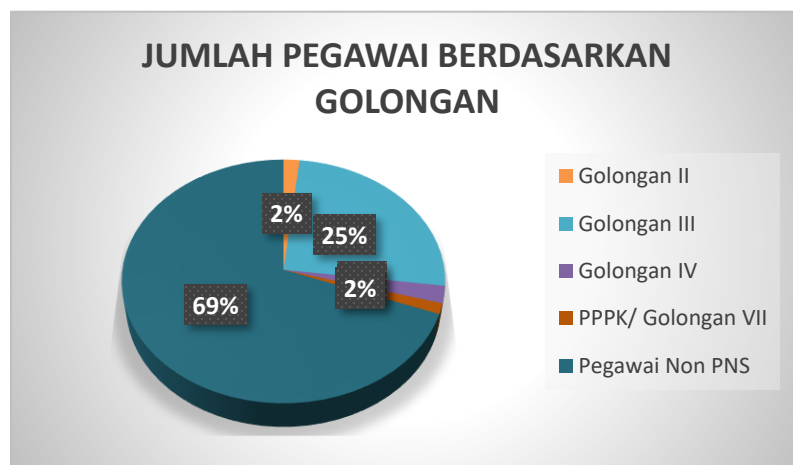
Berdasarkan data kepegawaian pada Bulan Juli Tahun 2025, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor memiliki sumber daya aparatur sebanyak 176 orang ASN dan 396 orang non ASN yang tersebar di pusat dan 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah.

Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

1. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, ASN Bappenda Kabupaten Bogor memiliki golongan IV yaitu sebanyak 13 Orang (2,27%), golongan III yaitu sebanyak 145 orang (25,35%), kemudian golongan II sebanyak 10 orang (1,75%), serta pegawai PPPK sebanyak 8 orang (1,40%) dan Pegawai Non PNS sebanyak 396 (69,23 %).

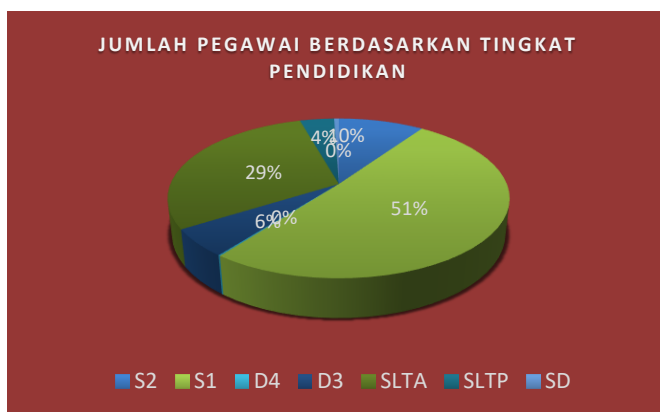


Sumber : Bappenda (Diolah)

Gambar 2.3.
Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

2. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar Pegawai di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor berpendidikan Sarjana (S-1) yaitu sebanyak 290 orang (50,70%), kemudian SLTA sebanyak 169 orang (29,55%), kemudian magister (S-2) sebanyak 55 orang (9,62%), Sarjana Muda (D3) sebanyak 32 orang (5,59%), SLTP sebanyak 22 orang (3,85%), dan SD sebanyak 3 orang (0,52%) dan Sarjana Muda (D4) sebanyak 1 orang (0,17%).

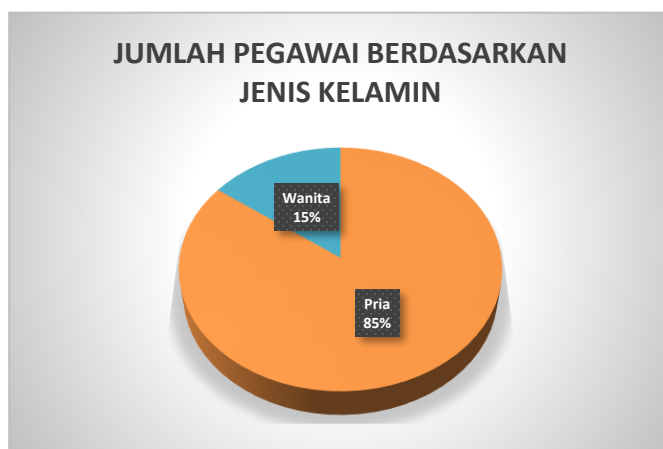


Sumber : Bappenda (Diolah)

Gambar 2.4
Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

3. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya, SDM di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 370 orang (64,69%), sedangkan sisanya sebanyak 202 orang (35,31%) berjenis kelamin perempuan.



Sumber : Bappenda (Diolah)

Gambar 2.5 Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin

4. Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Bappenda

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diperlukan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional dan staff.

Namun masih ada jabatan yang belum terpenuhi sehingga harus dilakukan analisa berapa kebutuhan SDM yang belum terpenuhi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Berikut adalah

tabel yang akan menggambarkan kondisi kebutuhan akan SDM pada Bappenda :

Tabel 2.1
Analisis Ketersediaan Jabatan Struktural
Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Eselon	Jumlah yang Seharusnya menduduki Jabatan Struktural	Sudah Terpenuhi	Kebutuhan
Eselon 2	1	1	-
Eselon 3a	1	1	-
Eselon 3b	4	4	-
Eselon 4a	20	20	-
Eselon 4b	10	10	-
Total	36	36	-

Sedangkan dari sisi Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum terpenuhi seluruhnya. Khususnya pada beberapa jabatan masih belum terpenuhi sebanyak 181 orang dari total kebutuhan 333 orang, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Analisis Ketersediaan Jabatan
Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Jabatan	Jumlah yang Seharusnya	Sudah Terpenuhi	Kebutuhan
Perencana Ahli Muda	1	-	1
Analisis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Pertama	3	-	3
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
Penelaah Teknis Kebijakan	136	89	47
Penata Kelola Sistem & Teknologi Informasi	4	2	2
Pranata SDM Aparatur	2	0	2
Arsiparis Terampil	3	1	2
Pengolah Data Informasi	73	12	47
Pengadministrasian Perkantoran	110	34	76
Total	333	138	181

B. ASET ATAU MODAL

Pada saat ini kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berlokasi di Jl. Tegar Beriman Komplek Perkantoran Pemda Cibinong. Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam kondisi baik.

Data asset atau modal secara umum yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah per Juli 2025 dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Aset atau Modal Pendukung Kinerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	7.795	M ²
2	Gedung	4.222	M ²
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon/ Fax	6	Line
6	Tablet	13	Unit
7	Area Parkir	3	Area
8	Ruang Rapat	6	Ruang
9	Ruang Arsip	2	Ruang
10	Koperasi	1	Buah
11	Mesjid	1	Buah
12	Musolla	2	Buah
13	Toilet	8	Area
14	Kendaraan Roda 4	57	Unit
15	Kendaraan Roda 2	74	Unit
16	Meja Rapat	116	Set
17	<i>Air Conditioner</i>	101	Unit
18	Komputer PC	268	Unit
19	Komputer Notebook/ Laptop	116	Unit
20	Server	18	Unit
21	Meja	499	Unit
22	Kursi	624	Unit
23	Filling Kabinet	93	Unit
24	Rak Besi	419	Unit
25	LCD Projector	22	Unit
26	Jaringan Internet	56	Unit
27	Buku Perpustakaan	0	Buah
28	Area Taman Halaman	2	Area
29	Lemari Arsip	120	Unit
30	Tempat Fitness	1	Area

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) dari mulai inventarisasi kebutuhan barang modal, pencatatan serta distribusi barang sesuai dengan kebutuhan yang belum dilaksanakan secara efektif.

2.1.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan :

- a. Target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan tahun 2020 hingga 2024.
- b. Capaian program-program yang telah dilaksanakan tahun 2020-2024 dengan indikator kinerja yang telah ditentukan pada tahun-tahun tersebut;
- c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan perangkat daerah secara realisasi kinerja disajikan dalam Tabel 2.4 yang mana dari seluruh indikator kinerja rata-rata mencapai 100% bahkan lebih. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran dapat dilihat dalam tabel 2.5 yang menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 95,63%.

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020-2024

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
TAHUN ANGGARAN 2020																		
1	TUJUAN : Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Bersih, Efektif Dan Akuntabel	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	31,59					36,56					115,73				
2	SASARAN : Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas	Kesesuaian Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah	%	100,00					98,60					98,60				
		Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	64,01					64,62					100,95				
1	Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rupiah	7.796.175.823.514					7.687.179.717.004					98,60				
	Sub kegiatan:																	
1	Pengolahan Data Dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah	Dokumen	17					17					100,00				
2	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen	6					6					100,00				
		Jumlah rupiah Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah		7.796.175.823.514					7.687.179.717.004					98,60				
2	Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Presentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	%	68,41					63,28					92,50				
	Sub kegiatan:																	
1	Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Transfer	Dokumen	12					12					100,00				

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	2.462.621.761.551					2.810.155.352.282					114,11				
	Sub kegiatan:																	
1	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Dokumen	10					10					100,00				
		Jumlah rupiah Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah		2.462.621.761.551					2.827.923.538.176					114,83				
2	Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut Pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya	Orang	350					249					71,14				
3	Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sosialisasi Media Elektronik	Media Elektronik	3					3					100,00				
		Jumlah Sosialisasi Tatap Muka Pendapatan Daerah	Orang	2.000					1.753					87,65				
		Jumlah Sosialisasi Media Cetak	Media Cetak	7.644					3.209					41,98				
4	Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen data realisasi penerimaan pendapatan daerah : Dokumen laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	Dokumen	19					19					100,00				
		Jumlah Dokumen Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah untuk 10 Jenis Pajak Daerah dan 2 Retribusi Daerah	Dokumen	2					2					100,00				
5	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja UPT Pajak Daerah dan Rekon BRI dan BJB	Dokumen	12					12					100,00				
		Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan dan Peningkatan PAD Selain Pajak Daerah	Dokumen	12					12					100,00				
6	Pengelolaan Teknologi Informasi	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Bulan	12					12					100,00				

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah Lainnya	Rupiah	622.447.196.000					699.320.434.971					112,35				
		Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang berbayar	Rupiah	27.286.069.509					33.775.911.204					123,78				
		Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	Wajib Pajak	4.990					3.078					61,68				
	Sub kegiatan:																	
1	Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan ekstensifikasi	Wajib Pajak	450					455					101,11				
2	Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah yang dapat dilayani	Wajib Pajak	410					534					130,24				
3	Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah yang tersedia	SPTPD	36.000					38.554					107,09				
4	Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan intensifikasi	Wajib Pajak	80					97					121,25				
5	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang akan diperiksa	Wajib Pajak	56					0					0,00				
6	Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah	Nota Perhitungan Pajak Daerah	13.400					13.122					97,93				
7	Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Yang tersedia	Dokumen	15.268					14.788					96,86				
8	Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	Dokumen	12					12					100,00				
9	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang 8 pajak daerah yang berbayar	Rupiah	27.286.069.509					33.779.482.130					123,80				

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah Penerimaan PBB P2	Rupiah	475.563.511.000					526.068.200.819					110,62				
		Jumlah Piutang PBB P2 Yang berbayar	Rupiah	97.000.000.000					116.557.518.931					120,16				
		Collection Ratio	%	92,43					97,46					105,44				
	Sub kegiatan:																	
1	Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2	Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	Kecamatan	2					2					100,00				
			Objek Pajak	53.598					53.598					100,00				
2	Pengelolaan Zona Nilai Tanah	Jumlah Kecamatan yang disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah	Kecamatan	20					20					100,00				
		Jumlah Objek Pajak analisa zona nilai tanah untuk penetapan NJOP	Objek Pajak	400					400					100,00				
3	Verifikasi Obyek Pajak PBB P2	Jumlah kecamatan yang diverifikasi	Kecamatan	40					40					100,00				
		Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi	Objek Pajak	1.500					1.500					100,00				
4	Penilaian Individual PBB P2	Jumlah kecamatan yang dimutakhirkan Data objek dan subjek PBB	Kecamatan	40					40					100,00				
		Jumlah Objek Pajak PBB P2 Non Standar Dan Objek Pajak Khusus Ternilai dan Ditetapkan	Objek Pajak	128					152					118,75				
5	Pemutahiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2	Jumlah Kecamatan yang dimutakhirkan Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Kecamatan	1					1					100,00				
		Jumlah Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Objek Pajak	7.827					7.827					100,00				
6	Perekaman Data PBB P2	Jumlah data objek pajak PBB yang dilakukan Penetapan Pajak	Objek Pajak	150.000					98.436					65,62				
		Jumlah kecamatan yang dilakukan peremakan data objek pajak PBB	Kecamatan	40					40					100,00				

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7	Penerbitan Dokumen Ketetapan PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang dicetak dan ditetapkan	SPPT PBB	1.960.000					1.910.165					97,46				
8	Pelayanan Wajib Pajak PBB P2	Jumlah Wajib Pajak pada Locket PBB P2 terlayani	Wajib Pajak	125.000					102.296					81,84				
9	Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2	Jumlah Pemohon Layanan Berkas administrasi PBB P2 yang terkelola	Berkas	110.000					170.474					154,98				
10	Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	Jumlah Dana Penerimaan PBB P2 Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling yang terealisasi	Rupiah	198.767.447.337					197.590.337.630					99,41				
		Jumlah NOP Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling PBB P2 yang terealisasi	NOP	630.000					1.016.097					161,29				
11	Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Kecamatan	40					40					100,00				
		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Dokumen	12					12					100,00				
12	Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2	Jumlah Ketetapan SPPT PBB P2 yang terdistribusikan	SPPT PBB	1.812.114					1.812.113					100,00				
13	Penagihan PBB P2	Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2	Rupiah	96.000.000.000					116.392.774.270					121,24				
		Jumlah NOP Penerimaan Piutang PBB P2	NOP	800.000					905.094					113,14				
14	Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan dan Pembebasan PBB P2	Jumlah data Wajib Pajak yang tertangani keberatan, pengurangan pembetulan PBB P2	Wajib Pajak	6.000					5.275					87,92				
6	Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rupiah	473.405.407.743					632.023.140.926					133,51				
	Sub kegiatan:																	
1	Pendataan Potensi BPHTB	Jumlah data perumahan sebagai potensi BPHTB	Perumahan	200					200					100,00				
2	Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Analisis data Laporan BPHTB	Laporan	12					12					100,00				

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelayanan Validasi BPHTB	Jumlah berkas BPHTB yang tervalidasi	Berkas	50.000					50.000					100,00				
4	Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB	Jumlah berkas SSPD Yang Terverifikasi	Berkas	50.000					50.000					100,00				
5	Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB	Jumlah Dokumen Laporan Restitusi, Kompensasi, Pengurangan dan Pembebasan transaksi BPHTB	Laporan	12					12					100,00				
6	Pengendalian dan Evaluasi BPHTB	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB	Laporan	12					12					100,00				
7	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	Persentase Realisasi Target Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	%	100					129,20					129,20				
	Sub kegiatan:																	
1	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja per bulan	%	100					128,35					128,35				
	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri per bulan	%	100					125,04					125,04				
	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol per bulan	%	100					127,55					127,55				
	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung per bulan	%	100					141,63					141,63				
	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi per bulan	%	100					140,27					140,27				
	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin per bulan	%	100					117,35					117,35				

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup per bulan	%	100					123,06					123,06				
	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas per bulan	%	100					143,76					143,76				
	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg per bulan	%	100					134,22					134,22				
	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang per bulan	%	100					105,21					105,21				
8	Program Pelayanan Adminitrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keskretariatan	%	80,00					80,00					100,00				
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	80,00					80,00					100,00				
		Persentase Perencanaan sesuai Target	%	100,00					98,85					98,85				
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai	%	100,00					76,93					76,93				
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	100,00					99,30					99,30				
	Sub kegiatan:																	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan	12					12					100,00				
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis	5					5					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan rapat dan tamu makan minum yang tersedia	Porsi	19.200					19.200					100,00				

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Dokumen	12					12					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
5	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	Jenis Rekening	4					4					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
6	Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah orang pelayanan jasa keamanan kantor	Orang	12					12					100,00				
		Jumlah Bulan dibayarkannya pelayanan jasa keamanan kantor	Bulan	12					12					100,00				
7	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia	Jenis Rekening	2					2					100,00				
		Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor yang dibayarkan	Bulan	12					12					100,00				
8	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang lengkap dan dibayar pajaknya	Unit	150					150					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
9	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis Rekening	10					10					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
10	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Kebutuhan Perengkapan Gedung kantor yang tersedia	Jenis Rekening	4					4					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Utama Kantor		Gedung															
			Jenis Rekening	0					-									

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Gedung	2					2					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor	Jumlah Jenis Kantor yang terpelihara	Jenis	1					1					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
14	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	150					50					33,33				
			Bulan	12					12					100,00				
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis Rekening	1					1					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang terpelihara	Jenis Rekening	4					4					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi yang terpelihara	Jenis Rekening	2					2					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Jenis Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jenis Rekening	4					4					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
19	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jenis Rekening	11					11					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jenis Rekening	9					9					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jenis Rekening	11					11					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jenis Rekening	11					11					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jenis Rekening	11					11					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jenis Rekening	11					11					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jenis Rekening	10					10					100,00				

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			Bulan	12					12					100,00				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jenis Rekening	12					12					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jenis Rekening	11					11					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jenis Rekening	11					11					100,00				
			Bulan	12					12					100,00				
20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang	7					7					100,00				
		Jumlah Bulan pembayaran Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran		12					12					100,00				
21	Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan rohani	Orang	100					100					100,00				
		Jumlah Bulan Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Bulan	12					12					100,00				
22	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Pramuka yang tersedia		200					200					100,00				
		Jumlah bulan dalam Pengadaan Pakaian Dinas		12					12					100,00				
23	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	6					6					100,00				
		Jumlah Bulan Penyelolaan Administrasi Kepegawaian	Bulan	12					12					100,00				
24	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	100					100					100,00				

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Bulan Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Bulan	12					12					100,00				
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan Bappenda	Dokumen	3					3					100,00				
		Jumlah Bulan Penyusunan Pelaporan Keuangan	Bulan	12					12					100,00				
26	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	Dokumen	5					5					100,00				
		Jumlah Bulan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12					12					100,00				
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi serta perjanjian kinerja Bappenda	Dokumen	4					4					100,00				
		Jumlah Bulan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12					12					100,00				
28	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Bappenda	Dokumen	4					4					100,00				
		Jumlah Bulan Penyusunan Perencanaan Anggaran	Bulan	12					12					100,00				
29	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3					3					100,00				
		Jumlah Bulan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Bulan	12					12					100,00				
30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Bappenda	Dokumen	5					5					100,00				
		Jumlah bulan dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	12					12					100,00				

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
31	Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Kinerja	Media	5					5					100,00				
		Jumlah Sosialisasi media massa	Media	12					12					100,00				
TAHUN ANGGARAN 2021-2023																		
1	TUJUAN : Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Bersih, Efektif Dan Akuntabel	Rasio PAD	%		37,69	40,75	40,36			41,23	41,38	41,42			109,38	101,54	102,62	
2	SASARAN : Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%		37,69	40,75	40,36			41,23	41,38	41,42			109,38	101,54	102,62	
		Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%		63,52	63,38	66,06			65,29	69,46	69,56			102,78	109,60	105,31	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%		100	100	100			91,61	107,22	98,22			91,61	107,22	98,22	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen		41	41	18			41	41	18			100,00	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan :																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kali		2	1				2	1				100,00	100,00		
		Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		3	3	4			3	3	4			100,00	100,00	100,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen		1	1	1			1	1	1			100,00	100,00	100,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	1	1			1	1	1			100,00	100,00	100,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen		1	1	2			1	1	2			100,00	100,00	100,00	
		Jumlah Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen		1	1				1	1				100,00	100,00		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	1	2			1	1	2			100,00	100,00	100,00	
		Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dokumen		1	1				1	1				100,00	100,00		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah (LAKIP, LKPJ, LPPD, Sakip)	Dokumen		4	4	4			4	4	4			100,00	100,00	100,00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja (Evkin Triwulanan) Perangkat Daerah	Dokumen		4	4	4			4	4	4			100	100	100	
		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen		24	24				24	24				100	100		
		Jumlah Publikasi Kinerja	Kali		95	95				136	147				143,16	154,74		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan administrasi keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	Dokumen		1167	1.164				1167					100			
		Laporan administrasi keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	%		100	100	100			100	100	100			100	100	100	
	Sub Kegiatan :														100	100	100	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan perangkat daerah	Orang		210	210	183			210	210	183			100	100	100	
		Jumlah bulan gaji dan tunjangan yang diperoleh	Bulan		12	12	12			12	12	12			100	100	100	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan verifikasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		1.100	1.100	1100			1100	1100	1100			100	100	100	

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		14	14	14			14	14	14			100	100	100	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		1	1				1	1				100	100		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1					1					100	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		3					2					66,67	0,00		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan yang disusun	Dokumen		48	48				49	48				102	100		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Laporan				48					48					100	
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		1	1				1	1				100	100		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen				1					1					100	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		12					12					100			
		Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah tersusun dengan baik	%		100	100	100			90	100	100			90,00	100	100	
Sub Kegiatan :																		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang		110	544				110	544				100	100		
		Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang		450					420					93,33	0,00		
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit				4					4					100	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Orang		225	276				220	276				97,78	100		
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang		7	7				7	7				100	100		
		Jumlah bulan tenaga pendukung administrasi/teknis yang tersedia	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen				2					2					100	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya sistem informasi kepegawaian	Sistem		5	5				5					100			
		Jumlah porsi makan minum rapat koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi yang dilaksanakan	Porsi			4000					4000					100		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen				4					4						
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen hasil monitoring	Dokumen		12	12	12			12	12	12			100	100	100	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan	Kali		0	12					12					100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				399					399					100	
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan yang disosialisasikan	Bulan		12	240				12	240				100	100		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				185					185					100	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	Kali		1	1				1	1				100	100		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				200					200					100	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Layanan		10					10					100			
		Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	%		100	100	100			83,33	100	100			83,33	100	100	
	Sub Kegiatan :																	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik Yang Tersedia	Jenis		3	4				3	4				100	100		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				1					1					100	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jenis		26	5				25	5				96,15	100		
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jenis		37	18				37	18				100	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jenis		16	16				16	16				100	100		
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jenis		18	23				18	23				100	100		
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jenis		7	5				7	5				100	100		
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jenis		36	22				36	22				100	100		
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jenis		20	28				20	28				100	100		
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jenis		20	19				20	19				100	100		
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jenis		34	22				34	22				100	100		
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jenis		13	21				13	21				100	100		
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jenis		14	35				14	35				100	100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				6					6					100	

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Paket				2					2					100	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		2	12				2	12				100	100		
		Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jenis		34	16				34	16				100	100		
		Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jenis		17	13				17	13				100	100		
		Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jenis		17	19				17	19				100	100		
		Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jenis		22	16				22	16				100	100		
		Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jenis		22	16				22	16				100	100		
		Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jenis		11	18				11	18				100	100		
		Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jenis		21	19				21	19				100	100		
		Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jenis		16	16				16	16				100	100		
		Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jenis		15	19				15	19				100	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jenis		19	20				19	20				100	100		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				1					1					100	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Paket				1					1					100	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis		5	5				5	5				100	100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				10					10					100	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan yang tersedia	Jenis		10	4				10	4				100	100		
		Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Lembar		12.900	14.900				12900	14900				100	100		
		Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jenis		1	1				1	1				100	100		
		Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Bulan		12	12				12	12				100	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jenis		1	17.500				1	17500				100	100		
		Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jenis		1	1				1	1				100	100		
		Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jenis		1	1				1	1				100	100		
		Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah Jenis Cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jenis		1	1				1	1				100	100		
		Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jenis		1	1				1	1				100	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jenis		1	1				1	1				100	100		
		Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jenis		1	13.500				1	13500				100	100		
		Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Lembar		13.250	117.500				13250	117500				100	100		
		Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				6					6					100,00	

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Paket				1					1					100,00	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan dibayarkannya media bacaan yang tersedia	Bulan		12	12				12	12				100	100		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi yang diberikan makanan dan minuman	Porsi		13.255	3.625				13000	3625				98,08	100		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				10					10					100,00	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Bulan		11	7				11	7				100	100		
		Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Bulan		12	12				12	12				100	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Bulan		12	11				12	11				100	100		
		Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Bulan		11	12				11	12				100	100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				2					2					100	
		umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan				2					2					100	
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD	Dokumen		48	4				48	4				100	100		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan				2					2					100	
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sistem pendukung berbasis elektronik pada SKPD	Sistem		1					1					100	0,00		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen laporan pengadaan barang milik daerah	Dokumen		4					4					100			
		Laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik	%		100	100	100			97	150	100			97	150	100	
	Sub Kegiatan :																	

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan operasional sebanyak	Unit		1					6					600	0,00		
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit		12					12					100	0,00		
3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	Jenis		2					3					150	0,00		
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan gedung kantor	Gedung		1	1				1	2				100	200		
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung		1										-	0,00		
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Gedung		1	1	1			1	1	1			100	100	100,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Gedung		1	1	1			1	1	1			100	100	100,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Gedung		1	1	1			1	1	1			100	100	100	
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Gedung		1	1	1			1	1	1			100	100	100	
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Gedung		1	1	1			1	1	1			100	100	100	
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Gedung		1	1	1			1	1	1			100	100	100	
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Gedung		1	1	1			1	1	1			100	100	100	

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Layanan		2					2					100	0,00		
		Pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah terlaksana dengan baik	%		100	100	100			96	100	100			96,00	100	100,00	
	Sub Kegiatan :																	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan		12					12					100	0,00		
		Jumlah jenis rekening yang dibayarkan	Jenis		4					4					100	0,00		
		Jumlah bulan tagihan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Bulan			12					12					100,00		
		Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				4					4					100,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan				12					12					100,00	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia														0,00		
		Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Jenis		2	2					2				-	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan				1					1					100,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia	Jenis		31					31					100	0,00		
		Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang		67	27				67	27				100	100		
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Orang		4	4				4	4				100	100		
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Orang		4	4				4	4				100	100		
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Orang		4	4				4	4				100	100		
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Bulan		12	12				12	12				100	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Orang		4	4				4	4				100	100		
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Orang		4	4				4	4				100	100		
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Orang		4	4				4	4				100	100		
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Orang		5	5				5	5				100	100		
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Orang		4	4				4	4				100	100		
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Orang		4	4				4	4				100	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Bulan		12	12				12	12				100	100		
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Orang		4	4				4	4				100	100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				2					2					100,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan				12					12					100,00	
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Layanan		6					6					100	0,00		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%		100	100	100			83,33	86,11	100			83,33	86,11	100,00	
	Sub Kegiatan :																	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang lengkap dan dibayar pajaknya	Unit		150	72				140	12				93,33	16,67		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit				8					8					100,00	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit		150	72				100	72				66,67	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit roda 2			108					108					100		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				140					140					100,00	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jenis		5	4				5	4				100	100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				559					559					100,00	
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya	Jenis		1	1				1	1				100	100		
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit				1					1					100,00	
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pelayanan keamanan kantor yang dibayarkan	Bulan		12					12					100	0,00		
		Jumlah Gedung Penunjang Kantor yang terpelihara	Jenis		3					3					100	0,00		
		Jumlah Gedung Utama Kantor yang terpelihara	Gedung		1	1				1	1				100	100		
		Jumlah penunjang gedung kantor yang terpelihara (Halaman Kantor)	Jenis		2					2					100	0,00		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				4					4					100	
6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Jenis		5	1				4	1				80	100		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				6					6					100	

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD	%		100,00	100,00	100,00			114,30	99,93	102,02			114	99,93	102	
		Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%		4,00	5,00	6,00			14,30	-0,07	2,049			357	-1,47	34,16	
1	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Target Pendapatan Daerah	Rupiah		8.731.873.566.400					9.124.623.007.868					104	0,00		
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen			4	4				4	4				100	100	
	Sub Kegiatan :																	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pajak Daerah dan Target Pendapatan	Dokumen		14	15				14	16				100	106		
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen				15					15					100	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Pajak Daerah	Dokumen		15	12				22	29				146	241		
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen				4					4					100	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Media Sosialisasi Cetak	Buah		6.220	3.289				6.477	3322				104	101		
		Jumlah Media Sosialisasi Elektronik	Media		3	3				3	3				100	100		
		Jumlah Media Sosialisasi Tatap Muka	Orang		780	618				788	618				101	100		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan				4					4					100	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Jaringan		1	1				1	1				100	100		
		Tersedianya Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi		5	3				5	3				100	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit				3					3					100	
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata	Wajib Pajak PBB		4.500					6.310					140	0,00		
		Jumlah Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Obyek Pajak		30.000	50.000				58.181	94.839				193	189		
		Jumlah Perumahan yang didata	Perumahan		70	50				80	68				114,29	136,00		
		Jumlah Wajib Pajak Daerah yang didata	SPTPD		23.000	30.000				31.708	43.565				137,86	145,22		
		Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Wajib Pajak		103.592	105.866				103.552	105.866				99,96	100		
		Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Wajib Pajak		110.956	113.890				110.756	113.890				99,82	100		
		Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Wajib Pajak		271.193	136.252				270.998	136.252				99,93	100		
		Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Wajib Pajak		152.682	271.914				152.588	271.914				99,94	100		
		Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Wajib Pajak		60.000	60.000				59.962	60.000				99,94	100		
		Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Wajib Pajak		350	376				350	376				100	100		
		Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Wajib Pajak		295.887	288				295.735	288				99,95	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Wajib Pajak		158.992	166.649				157.889	166.649				99,31	100		
		Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Wajib Pajak		186.015	183.309				186.000	183.309				99,99	100		
		Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Wajib Pajak		176.064	170.414				176.000	170.414				99,96	100		
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan				5					5					100,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan				2					2					100,00	
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah yang diolah	Dokumen		12					12					100	0,00		
		Jumlah Data Pajak Daerah yang diolah	Objek Pajak		7.000	10.000				7.000	10.000				100	100		
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan				5					5					100,00	
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Desa yang Dinilai Ketetapan nya	Desa		66	144				68	85				103	59,03		
		Jumlah Obyek Pajak PBB yang dinilai	Obyek Pajak		100	100				115	100				115	100		
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak				70					83					118,57	

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan SPPT	Dokumen		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan SPPT	SPPT		1.960.000	1.970.000				1.962.520	2.030.945				100	103		
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen				12					12					100,00	
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah berkas permohonan pelayanan	Berkas Pelayanan		120.000	150.000				177.228	190.767				147	127		
		Jumlah wajib pajak permohonan pelayanan	Wajib Pajak		120.000	175.000				204.673	249.263				170	142		
		Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Orang		1.000	4.800				1.000	4.800				100	100		
		Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Dokumen		1.000	1.200				1.000	1.200				100	100		
		Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Orang		1.425	2.400				1.425	2.400				100	100		
		Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Dokumen		1.500	2.000				1.500	2.000				100	100		
		Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Orang		2.000	2.100				2.000	2.100				100	100		
		Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Dokumen		2.400	1.150				2.400	1.150				100	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Orang		1.200	1.200				1.200	1.200				100	100		
		Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Dokumen		1.680	1.680				1.680	1.680				100	100		
		Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Orang		3.600	3.600				3.600	3.600				100	100		
		Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Dokumen		4.000	4.000				4.000	4.100				100	102		
		Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Orang		1.110	210				1.115	210				100	100		
		Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Dokumen		555	101				550	101				99,10	100		
		Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Orang		1.500	1.644				1.500	1.644				100	100		
		Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Dokumen		1.500	1.644				1.500	1.644				100	100		
		Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Orang		1.500	850				1.450	850				96,67	100		
		Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Dokumen		1.200	1.047				1.200	1.047				100	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Orang		325	1.400				325	1.400				100	100		
		Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Dokumen		526	970				526	970				100	100		
		Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Orang		1.375	6.300				1.365	6.300				99,27	100,00		
		Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Dokumen		800	2.400				800	2.400				100	100		
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan				175.000					175.000					100	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan				4.800					4.800					100	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan				2.400					2.400					100	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan				2.100					2.100					100	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan				1.680					1.680					100	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan				3.600					3.600					100	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan				210					210					100	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan				1.644					1.644					100	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan				850					850					100	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan				1.400					1.400					100	

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan				6.300					6.300					100	
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas permohonan yang divalidasi	Berkas		50.000	60.000				67.246	60.960				134	101		
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen				60.000					60.896					101,49	
11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang yang tertagih	Rupiah		120.000.000.000	130.000.000.000				194.058.645.778	181.775.852.330				161	139		
		Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Wajib Pajak		30.365	15.699				30.360	15.699				99,98	100		
		Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Wajib Pajak		111.126	56.945				111.112	56.945				99,99	100		
		Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Wajib Pajak		57.973	68.126				57.966	68.126				99,99	100		
		Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Wajib Pajak		2.296	120				2.296	120				100	100		
		Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Wajib Pajak		1.187	812				1.187	812				100	100		
		Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Wajib Pajak		111.250	60.573				111.220	60.573				99,97	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Wajib Pajak		110.254	1.215				110.200	1.215				99,95	100		
		Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Wajib Pajak		159.092	54.755				159.045	54.755				99,97	100		
		Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Wajib Pajak		18.366	5.369				18.360	5.369				99,97	100		
		Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Wajib Pajak		11.385	1.185				11.385	1.185				100	100		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen				12					12					100,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Dokumen				12					12					100,00	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan penyelesaian keberatan	Wajib Pajak Daerah		6.000	6.000				7.133	7186				118	119		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen				12					12					100	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan	Dokumen Laporan		2	2				2	2				100	100		
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen				2					2					100	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Jenis retribusi per triwulan	Laporan Kegiatan		4	4				4	4				100	100		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan				4					4					100	
TAHUN ANGGARAN 2024																		
1	TUJUAN : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD Terhadap APBD	%					40,80					41,50					101
2	SASARAN : Meningkatnya Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	%					26,65					28,96					108
		Rasio Retribusi Daerah Terhadap APBD	%					10,17					10,65					104
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendapatan Daerah	Poin					82,00					82,09					100
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%					100					100					100
1	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	Dokumen					18					18					100
	Sub Kegiatan :																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					4					4					100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1					1					100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1					1					100,00

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					2					2					100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					2					2					100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					4					4					100,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					4					4					100,00
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen					1										0,00
2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan dan laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen					7					7					100,00
	Sub Kegiatan :																	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					210					210					100,00
		Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan yang diperoleh	Bulan					12					12					
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					1100					1100					100,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen					14					14					100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1					1					100,00

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen					1					1					100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan					49					49					100,00
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					1					1					100,00
3	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Baik	Dokumen					12					12					100,00
	Sub Kegiatan :																	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					1					1					100,00
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					3					2					66,67
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					12					12					100,00
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen					12					12					100,00
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen					12					12					100,00
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					331					331					100,00

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					200					200					100,00
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					200					200					100,00
4	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen					12					12					100,00
	Sub Kegiatan :																	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					2					2					100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					9					9					100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Paket					20					20					100,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					2					2					100,00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Paket					10					10					100,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					9					9					100,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					6					6					100,00
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Paket					10					10					100,00

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					11					11					100,00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12					12					100,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan					20					20					100,00
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					12					12					100,00
5	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Dokumen					12					12					100,00
	Sub Kegiatan :																	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan																
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Gedung					1					1					100,00
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Gedung					1					1					100,00

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Gedung					1					1					100,00
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Gedung					1					1					100,00
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Gedung					0										
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Gedung					1					1					100,00
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Gedung					1					1					100,00
6	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang perangkat daerah	Laporan					12					12					100,00
	Sub Kegiatan :																	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang dibayarkan	Laporan					12					12					100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan					120					120					100
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan					10					10					100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12					12					100

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan					120					120					100
7	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang terfasilitasi	Laporan					12					12					100
	Sub Kegiatan :																	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					9					9					100
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	Unit					110					110					100
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					287					287					100
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit					1					7					100
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					7										100
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					4					4					100
1	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	Rupiah					2.890.535.400.000					3.162.898.099.760					109
1	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan					12					12					100
		Laporan Pelayanan Pendapatan Daerah	Laporan					12					12					100

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Laporan potensi dan basis data pajak daerah	Laporan					2					2					100
		Persentase Jumlah Piutang yang Tertagih	%					100					100					100
	Sub Kegiatan :																	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen					13					13					100
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen					12					12					100
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan					12					12					100
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit					3					3					100
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan					12					12					100
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan					20					20					100
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan					12					12					100
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak					5.759					6.000					104,18
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen					12					12					100,00

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan					200.000					218.738					109,37
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan					4.800					4.800					100
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan					2.400					2.400					100
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan					2.100					2.100					100
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan					1.680					1.680					100
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan					3.600					3.600					100
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan					210					210					100
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan					1.644					1.644					100
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan					850					850					100
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan					1.400					1.400					100
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan					6.300					6.300					100
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen					80.000					80.000					100
11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen					5.091					5.091					100
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Dokumen					120					120					100
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen					6.000					6.594					109

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan	Dokumen					20					20					100
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan 3 jenis retribusi per triwulan	Laporan					4					4					100
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan					2					2					100,00



TABEL 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPENDA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Pajak Daerah	1.576.416.115.000	2.090.578.509.000	2.369.772.820.000	2.611.901.892.500	2.890.535.400.000	1.857.411.776.716	2.455.982.013.967	2.595.242.368.968	2.805.983.839.344	3.162.898.099.760	117,82	117,48	109,51	107,43	109,42	230.784.094.730.000	257.550.361.975.100
Retribusi Daerah	130.262.331.434	137.901.142.404	153.751.721.189	150.946.077.560	1103.452.722.060	128.914.969.533	126.416.502.513	93.889.999.876	125.780.223.025	1.167.815.241.115	98,97	91,67	61,07	83,33	105,83	33.526.279.892.940	32.856.338.721.240
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	67.887.501.000	64.271.727.832	74.195.370.019	76.280.118.159	77.598.507.685	67.102.677.276	71.303.513.920	75.860.020.313	76.240.907.549	79.014.844.959	98,84	110,94	102,24	99,95	101,83	7.204.664.493.900	7.390.439.280.340
Lain-lain PAD yang Sah	688.055.814.117	998.571.308.721	1.141.373.842.822	1.114.976.126.641	374.311.035.573	756.725.928.757	1.108.209.212.874	971.347.281.551	1.025.862.931.525	123.190.960.219	109,98	110,98	85,10	92,01	32,91	86.345.762.557.480	79.706.726.298.531
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.462.621.761.551	3.291.322.687.957	3.739.093.754.030	3.954.104.214.860	4.445.897.665.318	2.810.155.352.282	3.761.911.243.274	3.736.339.670.708	4.033.867.901.443	4.532.919.146.053	114,11	114,30	99,93	102,02	101,96	357.860.801.674.320	377.503.866.275.211
																-	-
Bagi Hasil Pajak (PBB dan PPH (Pasal 21, 25 dan 29/WPOPDN))	401.754.855.000	-	-	236.109.762.372	233.123.694.000	248.356.815.110	-	-	228.669.471.965	233.123.694.000	61,82	-		96,85	100,00	17.419.766.227.440	14.202.999.621.500
Bagi Hasil Sumber Daya Alam				129.820.527.277	195.238.479.000			-	102.434.035.888	195.978.552.000				78,90	100,38	6.501.180.125.540	5.968.251.757.760
Dana Alokasi Umum	1.883.157.955.000	-	3.745.851.537.015	2.052.413.870.000	2.454.620.694.000	1.849.796.843.000	-	3.601.509.058.298	2.052.382.277.320	2.512.510.342.000	98,23	-	96,15	100,00	102,36	202.720.881.120.300	200.323.970.412.360
Dana Alokasi Khusus	721.197.724.190			1.562.800.324.000	1.609.505.190.000	727.777.631.873	-		1.516.077.321.624	1.562.024.395.813	100,91			97,01	97,05	77.870.064.763.800	76.117.586.986.200
Dana Penyesuaian	574.595.346.000	-	568.914.807.000	600.457.783.000	616.232.706.000	574.120.558.252	-	568.002.884.307	602.113.618.850	610.718.567.700	99,92	-	99,84	100,28	99,11	47.204.012.840.000,	47.099.112.582.180
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	3.580.705.880.190	3.682.269.347.443	4.314.766.344.015	4.581.602.266.649	5.108.720.763.000	3.400.051.848.235	3.663.867.732.240	4.169.511.942.605	4.501.676.725.647	5.114.355.551.513	94,95	99,50	96,63	98,26	100,11	425.361.292.025.940	416.989.276.004.800
																-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	922.326.487.901	-	959.078.437.300	1.134.881.762.234	1.142.181.533.917	726.326.745.171	-	957.836.447.551	1.077.337.281.240	1.097.723.624.330	78,75		99,87	94,93	96,11	83.169.364.427.040	77.184.481.965.840
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	187.187.019.000	-	157.110.297.316	113.791.289.483	98.147.726.291	153.891.135.003	-	155.211.282.840	112.692.027.651	96.035.758.296	82,21		98,79	99,03	97,85	11.124.726.641.800	10.356.604.075.800

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	1.109.513.506.901	1.130.943.419.566	1.116.188.734.616	1.248.673.051.717	1.240.329.260.208	880.217.880.174	1.065.608.933.280	1.113.047.730.391	1.190.029.308.891	1.193.759.382.626	79,33	94,22	99,72	95,30	96,25	116.912.959.460.160	108.853.264.707.240
																-	-
Total Pendapatan Transfer	4.690.219.387.091	4.813.212.767.009	5.430.955.078.631	5.830.275.318.366	6.349.050.023.208	4.280.269.728.409	4.729.476.665.520	5.282.559.672.996	5.691.706.034.538	6.308.114.934.139	91,26	98,26	97,27	97,62	99,36	542.274.251.486.100	525.842.540.712.040
																-	-
Pendapatan Hibah	643.334.674.872	-	5.623.465.099	12.950.430.401	-	596.754.636.313	-	10.707.892.912	13.988.777.564	9.737.290.280	92,76		190,41	108,02	100,00	13.238.171.407.440	12.623.771.941.380
JKN					72.815.967.996					72.253.748.215					99,23	1.456.319.359.920	1.445.074.964.300
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	643.334.674.872	627.338.111.434	5.623.465.099	12.950.430.401	72.815.967.996	596.754.636.313	633.235.099.074	10.707.892.912	13.988.777.564	81.991.038.495	92,76	100,94	190,41	108,02	112,60	27.241.252.996.040	26.733.548.887.160
																-	-
JUMLAH PENDAPATAN	7.796.175.823.514	8.731.873.566.400	9.175.672.297.760	9.797.329.963.627	10.867.763.656.522	7.687.179.717.004	9.124.623.007.868	9.029.607.236.616	9.739.562.713.545	10.923.025.118.687	98,60	104,50	98,41	99,41	100,51	927.376.306.156.460	930.079.955.874.411
																-	-
																-	-
Belanja Pegawai	2.491.766.476.033	2.759.116.502.668	2.617.045.532.546	2.750.327.602.809	3.033.279.320.129	2.443.437.303.822	2.710.767.680.994	2.541.872.794.642	2.595.796.172.438	2.979.233.482.385	98,06	98,25	97,13	94,38	98,22	273.030.708.683.700	265.422.148.685.620
Belanja Barang Dan Jasa	2.857.796.798.000	2.589.968.146.218	3.400.769.009.210	3.510.994.364.976	3.848.440.662.852	2.720.826.752.985	2.458.289.647.048	3.190.695.590.713	3.395.561.235.841	3.718.690.375.829	95,21	94,92	93,82	96,71	96,63	324.159.379.625.120	309.681.272.048.328
Belanja Hibah	301.756.854.000	332.553.669.853	635.412.002.745	646.366.446.352	740.876.752.513	257.143.590.699	321.511.230.288	586.573.793.733	637.317.308.866	730.459.629.135	85,22	96,68	92,31	98,60	98,59	53.139.314.509.260	50.660.111.054.420
Belanja Bantuan Sosial	71.606.200.000	31.180.000.000	37.323.410.000	30.826.100.010	8.483.000.356	52.356.765.000	31.135.000.000	22.704.000.000	30.350.700.000	8.433.000.000	73,12	99,86	60,83	98,46	99,41	3.588.374.207.320	2.899.589.300.000
Jumlah Belanja Operasi	5.722.926.328.033	5.712.818.318.739	6.690.549.954.501	6.938.514.514.147	7.631.079.735.850	5.473.764.412.506	5.521.703.558.330	6.341.846.179.088	6.659.025.417.145	7.436.816.487.349	95,65	96,65	94,79	95,97	97,45	653.917.777.025.400	628.663.121.088.368
																-	-
Belanja Tanah	-	11.610.924.149	27.063.384.780	39.600.138.102	6.243.846.057		8.262.278.208	22.892.910.800	17.052.699.793	3.482.922.300	-	71,16	84,59	43,06	55,78	1.690.365.861.760	1.033.816.222.020
Belanja Peralatan dan Mesin	-	495.639.395.900	444.142.626.635	517.686.739.337	1.217.803.009.291	-	468.161.585.532	416.040.409.365	502.671.321.305	1.190.594.690.597	-	94,46	93,67	97,10	97,77	53.505.435.423.260	51.549.360.135.980
Belanja Gedung dan Bangunan	-	716.956.339.364	440.593.909.387	323.705.407.787	442.436.355.948	-	620.630.488.097	386.665.025.831	289.483.942.554	419.897.500.148	-	86,56	87,76	89,43	94,91	38.473.840.249.720	34.333.539.132.595
Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	616.035.196.836	632.910.553.342	540.330.459.917	303.677.476.309	-	548.652.156.555	556.751.710.894	431.474.020.100	283.475.007.987	-	89,06	87,97	79,85	93,35	41.859.073.728.080	36.407.057.910.728
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	57.295.815.948	32.718.960.135	63.618.762.842	89.060.603.755	-	55.547.944.879	32.302.008.890	62.660.341.380	88.886.694.533	-	96,95	98,73	98,49	99,80	4.853.882.853.600	4.787.939.793.640
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	669.250.000	5.782.063.626	-	-	-	665.600.000	5.352.673.868	-	-	-	99,45	92,57	129.026.272.520	120.365.477.360
Jumlah Belanja Modal	1.709.601.976.000	1.897.537.672.197	1.577.429.434.279	1.485.610.757.985	2.065.003.354.986	1.488.950.269.913	1.701.254.453.271	1.414.652.065.780	1.304.007.925.132	1.991.689.489.433	87,09	89,66	89,68	87,78	96,45	174.703.663.908.940	158.011.084.070.576



Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
																-	-
Belanja Tak Terduga	416.434.853.481	90.785.403.830	59.532.570.574	53.099.520.535	34.889.316.695	394.033.804.687	75.948.512.154	30.229.239.161	52.261.011.730	32.871.816.732	94,62	83,66	50,78	98,42	94,22	13.094.833.302.300	11.706.887.689.280
Jumlah Belanja Tak Terduga	416.434.853.481	90.785.403.830	59.532.570.574	53.099.520.535	34.889.316.695	394.033.804.687	75.948.512.154	30.229.239.161	52.261.011.730	32.871.816.732	94,62	83,66	50,78	98,42	94,22	13.094.833.302.300	11.706.887.689.280
																-	-
Bagi Hasil Pajak	197.781.688.000	-	216.569.110.615	223.285.397.804	249.965.816.365	197.781.683.786	-	216.421.109.920	223.110.026.718	248.982.986.349	100,00		99,93	99,92	99,61	17.752.040.255.680	17.725.916.135.460
Bagi Hasil Retribusi			5.865.981.375	4.268.148.200	-			5.857.501.395	4.264.851.907	-			99,86	99,92	-	202.682.591.500	202.447.066.040
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	854.726.777.000	-	544.858.095.000	-	1.412.170.273.110	850.963.209.687	-	543.946.172.307	-	1.404.184.620.468	99,56		99,83		99,43	56.235.102.902.200	55.981.880.049.240
Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	765.032.701.342	1.395.921.669.307	-	-	-	757.450.489.715	1.374.958.328.062	-	-		99,01	98,50	-	43.219.087.412.980	42.648.176.355.540
Jumlah Belanja Transfer	1.052.508.465.000	1.417.714.307.234	1.532.325.888.332	1.623.475.215.311	1.662.136.089.475	1.048.744.893.473	1.409.487.609.776	1.523.675.273.337	1.602.333.206.687	1.653.167.606.817	99,64	99,42	99,44	98,70	99,46	145.763.199.307.040	144.748.171.801.800
																-	-
JUMLAH BELANJA DAERAH	8.901.471.622.514	9.118.855.702.000	9.859.837.847.686	10.100.700.007.978	11.393.108.497.006	8.405.493.380.579	8.708.394.133.531	9.310.402.757.366	9.617.627.560.694	11.114.545.400.331	94,43	95,50	94,43	95,22	97,55	987.479.473.543.680	943.129.264.650.024
																-	-
Surplus / (Defisit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,99	(107,56)	41,04	(40,19)	36,46	-	-
	1.105.295.799.000	386.982.135.600	684.165.549.926	303.370.044.351	525.344.840.484	718.313.663.575	416.228.874.337	280.795.520.750	121.935.152.851	191.520.281.644						60.103.167.387.220	13.049.308.775.612
																-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.105.295.799.000	386.982.135.600	803.205.909.926	403.370.044.351	425.344.840.484	1.105.295.799.164	386.977.035.589	803.205.909.926	403.409.687.633	425.344.840.484	100,00	100,00	100,00	100,01	100,00	62.483.974.587.220	62.484.665.455.922
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	50.000.000.000	100.000.000.000				50.000.000.000	100.000.000.000				100,00	100,00	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.105.295.799.000	386.982.135.600	803.205.909.926	453.370.044.351	525.344.840.484	1.105.295.799.164	386.977.035.589	803.205.909.926	453.409.687.633	525.344.840.484	100,00	100,00	100,00	100,01	100,00	65.483.974.587.220	65.484.665.455.922
															-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	50.000.000.000	100.000.000.000	-	-	-	50.000.000.000	100.000.000.000	-			100,00	100,00	-	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	69.040.360.000	50.000.000.000	-			69.040.344.825	50.000.000.000	-			100,00	100,00	-	2.380.807.200.000	2.380.806.896.500
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	119.040.360.000	150.000.000.000	-	-	-	119.040.344.825	150.000.000.000	-			100,00	100,00	-	5.380.807.200.000	5.380.806.896.500
															-	-	-
PEMBIAYAAN NETO	1.105.295.799.000	386.982.135.600	684.165.549.926	303.370.044.351	525.344.840.484	1.105.295.799.164	386.977.035.589	684.165.565.101	303.409.687.633	525.344.840.484	100,00	100,00	100,00	100,01	100,00	60.103.167.387.220	60.103.858.559.422
																-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	B -	-	-	-	386.982.135.589	803.205.909.926	403.370.044.351	425.344.840.484	333.824.558.840					-	-	47.054.549.783.814

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN BAPPENDA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berorientasi terhadap pencapaian target pendapatan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian target tersebut didukung oleh pihak-pihak baik yang berperan langsung ataupun sebagai mitra kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Bappenda memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini wajib pajak sesuai dengan objek pajaknya.

Dalam pelaksanaan tugas lainnya Bappenda berkoordinasi dengan mitra terkait yaitu diantaranya DPRD, BPN, Kejaksaan, IPPAT, PHRI, Bank BJB, BRI dan *platform e- Commers*. Selain itu dalam mendukung pencapaian kinerja Bappenda berkoordinasi dengan BUMD-BUMD di Kabupaten Bogor.

Kemudian beberapa SKPD terkait dengan Bappenda baik dalam hal administrasi maupun SKPD penghasil Retribusi antara lain yaitu Sekretariat Daerah, Bappedalitbang, BPKAD, DPMPTSP, Diskominfo, DPUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pemuda dan Olahraga, RSUD KH.Idham Chalid, RSUD R. Moh. Noh Nur, RSUD RH. Satibi, dan RSUD Bakti Pajajaran.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan terbentuk ketika ada beberapa akar masalah yang sering kali muncul yang kemudian menjadi sebuah masalah hingga dapat disimpulkan apa masalah pokok sebenarnya dari sebuah organisasi.

Berikut ini beberapa akar masalah yang terdapat dalam lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah :

1. Masih kurangnya SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi (juru sita pajak, pemeriksa pajak, penilai pajak);
2. Belum tersedianya Regulasi serta Juklak mengenai Retribusi;
3. Data Retribusi belum diolah dan dikelola secara digital sehingga sulit untuk menentukan potensi retribusi daerah;

4. Sistem Bappenda belum terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki potensi terhadap pajak dan Retribusi Daerah;
5. Belum Optimalnya Updating Data sebagai bahan penyusunan perencanaan target pendapatan daerah;
6. Data Retribusi belum diolah dan dikelola secara digital sehingga sulit untuk menentukan potensi retribusi daerah;
7. Kurangnya sosialisasi terkait regulasi menyebabkan koordinasi dan komunikasi antar instansi vertikal belum optimal;
8. Fokus pada Pendapatan Jangka Pendek.

Dari 8 (delapan) akar masalah tersebut kemudian terbentuk 4 fokus masalah yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan pajak daerah, termasuk retribusi daerah;
2. Belum optimalnya tingkat pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
3. Opsen masih tergantung pada regulasi Provinsi;
4. Evaluasi terhadap pemanfaatan aset belum optimal sehingga berpengaruh terhadap potensi Retribusi Daerah.

Sehingga dari hasil pemetaan permasalahan tersebut dapat dirumuskan bahwa masalah pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yakni “ Belum Optimalnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif”.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan permasalahan pelayanan dan analisis isu strategis perangkat daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah di masa datang. Karena itu, dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik dilihat dari dinamika regional maupun dinamika nasional.

Terkait dengan lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh dinamika yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung, baik pada skala regional, nasional maupun internasional. Dinamika lingkungan eksternal yang berpotensi memberi dampak terhadap pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, antara lain:

1. Penetapan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 134);

- c) Regulasi penetapan tenaga fungsional terkait dengan pemungutan pajak daerah
2. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi khususnya investasi; Upaya pemerintah dalam menarik investasi ke dalam negeri dengan kebijakan pengurangan pajak badan atau perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday)
3. Pengelolaan Pajak Air Permukaan, akan dipengaruhi oleh terus meningkatkan realisasi penanaman modal di Kabupaten Bogor, baik PMA maupun PMDN yang memanfaatkan air permukaan, serta adanya peluang untuk menjadikan *spring water* sebagai bagian dari objek pajak Kabupaten Bogor. Pada sisi lain, terdapat hambatan dalam hal regulasi syarat perolehan izin pemanfaatan air permukaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas pendapatan di luar sektor perpajakan, maka penggalan potensi-potensi non pajak dari pendayagunaan aset-aset produktif serta perluasan basis usaha Badan Usaha Milik Daerah serta sumber retribusi daerah dan pendapatan lainnya harus menjadi arus utama kebijakan yang perlu diambil dalam konteks tata kelola pendapatan daerah di era otonomi daerah.

Berangkat dari uraian di atas, maka isu-isu strategis pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi dan kemampuan SDM yang belum efektif dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya;
- 2) Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah belum optimal karena penggunaan aplikasi berbasis digital belum dilaksanakan secara efektif, dan belum dilakukan berdasarkan kajian akademik.
- 3) Belum optimalnya integrasi sistem untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi perpajakan daerah.

Untuk lebih rinci mengenai perumusan isu-isu strategis dapat dilihat dalam tabel 2.6 berikut ini.

TABEL 2.6
PERUMUSAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN PENGELOLAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BAPPENDA	PERMASALAHAN BAPPENDA	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN BAPPENDA	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN BAPPENDA			ISU STRATEGIS BAPPENDA
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, BPHTB, PBJT (Jasa Perhotelan, Makanan dan/ Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Tenaga Listrik, Jasa Parkir), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Retribusi Daerah.	Belum Optimalnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) belum tersedia	Adanya kemajuan di bidang teknologi di tingkat dunia mengarahkan setiap pekerjaan menggunakan sistem digitalisasi bahkan tidak sedikit menggunakan teknologi AI.	Transformasi Digital menjadi isu nasional dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Sehingga memudahkan dalam mewujudkan satu data dalam satu sistem (Satu Data Indonesia)	Pelayanan Publik berbasis digital di tingkat pemerintah Provinsi/Daerah	Kompetensi dan kemampuan SDM yang belum efektif dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya
						Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah belum optimal karena penggunaan aplikasi berbasis digital belum dilaksanakan secara efektif, dan belum dilakukan berdasarkan kajian akademik.
						Belum optimalnya integrasi sistem untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi perpajakan daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bogor dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), dengan sasaran yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi (Pemerintah Kab.Bogor, 2025. Dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029).

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Karena itu, selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam dokumen RPJMD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, yaitu:

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

Pernyataan Tujuan jangka menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan ditarik berdasarkan peraturan daerah serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PAD atau Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Oleh karena itu semakin meningkat PAD suatu daerah maka diharapkan semakin meningkat kemandirian daerahnya.

3.2. Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria berikut:

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- c. Sasaran memenuhi kriteria kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Berangkat dari hal-hal tersebut, Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah

Meningkatkan Pendapatan Daerah dari komponen Pajak Daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 97).

Dengan Indikator sasaran yaitu sebagai berikut :

Rasio Pajak Daerah terhadap APBD

Nilai Rasio Pajak Daerah Terhadap **APBD (Total Pendapatan dalam APBD)** ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap APBD} = \frac{\text{Total Pajak Daerah}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Dengan diketahuinya nilai rasio pajak daerah terhadap APBD maka akan dapat diketahui seberapa mampu pendapatan dari pajak daerah berkontribusi terhadap total pendapatan dalam APBD yang tentunya untuk memenuhi seluruh kebutuhan Daerah Kabupaten Bogor.

2. Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan komponen pendapatan yang sangat berpengaruh terhadap komposisi pendapatan dalam APBD, oleh karena itu dengan meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya. Kemampuan retribusi daerah dapat diukur melalui Indikator yaitu sebagai berikut :

Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD

Nilai Rasio Retribusi Daerah Terhadap **APBD** (*Total Pendapatan dalam APBD*) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD} = \frac{\text{Total Retribusi Daerah}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Dengan diketahuinya nilai Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD maka akan dapat diketahui seberapa mampu pendapatan dari Retribusi Daerah berkontribusi terhadap total pendapatan dalam APBD yang tentunya untuk memenuhi seluruh kebutuhan Daerah Kabupaten Bogor.

Berangkat dari hal-hal tersebut, maka rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, dapat dilihat dari tabel 3.1 sebagai berikut:

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025-2029

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rasio PAD Terhadap APBD	%	45,13	44,51	44,17	43,24	42,42	41,56	
		1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	%	33,48	32,33	31,33	30,42	29,47	28,54	
		2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	%	9,77	10,31	11,07	11,12	11,33	11,47	

3.3 Arah Kebijakan Bappenda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappenda Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun;
- c. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- d. Merumuskan draft arah kebijakan;
- e. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memutuskan arah kebijakan.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah;
2. Menyusun regulasi yang berpedoman terhadap implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 beserta turunannya;
3. Mengoptimalkan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah;
4. Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
5. Pengembangan dan inovasi sistem aplikasi pelayanan pajak daerah;
6. Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
7. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan tersebut adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bogor serta selaras dengan strategi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra ini, keterkaitan itu digambarkan dalam table 3.2 berikut ini.

TABEL 3.2
ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
	<u>Tugas Pokok:</u>	<u>Strategi :</u>	<u>Strategi :</u>	
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah	Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin pemerintahan yang bersih dan tanpa KKN	1. Pemantapan regulasi dan pedoman pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah serta penguatan basis data pajak daerah; 2. Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mendorong percepatan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD); 3. Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui pelayanan online; 4. Optimalisasi Pengolahan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Instensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, serta peningkatan sinergi dengan pengelola Retribusi Daerah 5. Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah; 6. Penerapan One Map System sebagai bank data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
	<u>Fungsi:</u>	<u>Arah Kebijakan :</u>	<u>Arah Kebijakan :</u>	
	Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah	1. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital (40 Kecamatan, 36 SKPD)	1. Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
	Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah	2. Akselerasi pembangunan perdesaan dan kelurahan (416 Desa, 19 kel)	2. Menyusun regulasi yang berpedoman terhadap implementasi UU nomor 1 Tahun 2022 beserta turunannya	
	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah	3. Peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta (36 SKPD, 40 Kecamatan) 4. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment (36 SKPD, 40 Kecamatan)	3. Mengoptimalkan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah	
	Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah	5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah (Pemerintah Daerah)	4. Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah	
	Pelaksanaan reformasi birokrasi	6. Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi (32 PD, 4 RSUD dan 40 Kecamatan)	5. Pengembangan dan inovasi sistem aplikasi pelayanan pajak daerah	
	Pelaksanaan administrasi Badan	7. Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan daerah	6. Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	
	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya	8. Peningkatan kesatuan bangsa dan politik	7. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	
		9. Peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan (40 kecamatan)		
		10. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah		

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
		11. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (Pemerintah Daerah)		
		12. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah		
		13. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda/perkada dan sosialisasi kepada masyarakat (40 Kecamatan dengan prioritas Cibinong Raya)		
		14. Peningkatan kualitas kebijakan berbasis Riset dan Inovasi (Pemerintah Daerah)		
		15. Penguatan teknologi dan sistem informasi dalam penerimaan laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan		
		16. Penguatan pelayanan publik di wilayah kecamatan		
		17. Peningkatan kapasitas daerah terhadap bencana		

3.4. Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappenda Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam menentukan strategi Perangkat Daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi jangka menengah Perangkat Daerah, antara lain:

1. Mengkaji sasaran pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya maupun periode pelayanan Perangkat Daerah yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah dan capaian pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terpenting dan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta

6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pelayanan Perangkat Daerah (*strategy focussed-management*). Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolakbelakang;
- b. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Langkah-langkah merumuskan strategi yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*kekuatan/strengths*, *kelemahan/weaknesses*, *peluang/opportunities* dan *tantangan/threats*), dengan langkah-langkah meliputi:
 - a. Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*) dan mengaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan diketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi dirumuskan satu strategi utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis. Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil daerah termasuk di dalamnya Perangkat Daerah. Diskusi-diskusi yang intens akan sangat membantu penajaman tiap komponen.
 - b. Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Pemilihan strategi

yang paling tepat di antara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

- 1) Dibahas kembali melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategis;
 - 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
 - 3) Menggunakan metode *Balanced Scorecard*; dan
 - 4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektifitas pemilihan strategi.
- c. Ketiga, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat, maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*) agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif berikut:
- 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
 - 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
 - 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
 - 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, disajikan pada tabel berikut:

Strenghts		Weakness	
1.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki 10 (sepuluh) UPT Pajak Daerah yang tersebar di 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor	1.	Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan pendapatan daerah
2.	Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah yang cukup besar yaitu 2.664 km ² dengan jumlah penduduk 5.132 juta jiwa.	2.	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.	Dalam aspek Budaya organisasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh oleh seluruh anggota organisasi yaitu jujur, amanah dan ramah, nilai-nilai tersebut merupakan gagasan yang disingkat BAPPENDA JUARA.	3.	Bappenda belum memiliki juru sita dan penilai pajak
4.	Terbangunnya semangat kebersamaan dan hubungan yang harmonis antara pimpinan dan staff di lingkungan BAPPENDA	4.	Belum adanya forum koordinasi antar perangkat daerah penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah
5.	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati Bogor dan DPRD kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah.	5.	Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar-benar akurat dan teruji.
Opportunities		Threats	
1.	Semakin tingginya antusias dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau.	1.	Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mematuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat prosedur
2.	Semakin meningkatnya iklim potensi iklim kompetisi antar daerah dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya saing, terutama pada aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan kualitas sumber daya manusia	2.	Masih terdapatnya sejumlah kasus korupsi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, sehingga berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan sehingga resistensi masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah dan nasional.
3.	Pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif yang disertai dengan peningkatan daya beli.	3.	Belum meratanya kondisi infrastruktur transportasi publik terutama jalan yang dalam kondisi baik, berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat wajib pajak terhadap pelayanan publik.
4.	Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi pelayanan publik		

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Pemantapan regulasi dan pedoman pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah serta penguatan basis data pajak daerah;
2. Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mendorong percepatan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);

3. Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui pelayanan online;
4. Optimalisasi Pengolahan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Instensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, serta peningkatan sinergi dengan pengelola Retribusi Daerah.
5. Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah;
6. Penerapan *One Map System* sebagai bank data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai gambaran tahapan strategi selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 3.3
PRIORITAS PEMBANGUNAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
BERDASARKAN PENAHAPAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026-2030

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<u>Strategi :</u>	<u>Strategi :</u>	<u>Strategi :</u>	<u>Strategi :</u>	<u>Strategi :</u>	<u>Strategi :</u>
Pemantapan regulasi dan pedoman pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah serta penguatan basis data pajak daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mendorong percepatan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui pelayanan online	Optimalisasi Pengolahan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Instensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah serta peningkatan sinergi dengan pengelola Retribusi Daerah	Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah	Penerapan <i>One Map System</i> sebagai bank data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, didasarkan pada strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Hal itu bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pada sisi lain, untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penyelarasan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Perubahan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

- Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan

kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Apabila SPM dan NSPK belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Sumber pendanaan rencana Perangkat Daerah bersumber dari APBD serta sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki 7 arah kebijakan dan 6 strategi yang secara bersinergi mendukung pelaksanaan program-program kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2025-2029 Bappenda memiliki 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 60 (Enam Puluh) Sub Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2

TABEL 4.1

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Regulasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan kualitas perencanaan dan Realisasi Regulasi serta Pengelolaan Sistem Informasi	Persentase peningkatan kualitas perencanaan dan Realisasi Regulasi serta Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase capaian layanan pajak daerah yang sesuai prosedur	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya Potensi Pendapatan Daerah	PAD	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah	Sub Kegiatan :	
			Meningkatnya Pelayanan Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan	Persentase Capaian Pelayanan Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan Pendapatan Daerah	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	
						2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
						3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
						4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
						5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
						6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
						7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
						8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	
						9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
						10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
						11. Penagihan Pajak Daerah	
						12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
						13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
						14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	
						15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
						Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
						Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan :	
						1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
						4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan :	
						1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan :	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan :	
						1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan :	
						1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
						3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						6. Fasilitas Kunjungan Tamu	
						7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan :	
						1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						4. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	
						Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan :	
						1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	
						2. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
						3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan :	
						1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
TAHUN 2025-2029
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	0	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rupiah	3.162.898.099.760	24.386.400.741	3.817.688.382.057	25.697.229.377	3.852.645.892.463	28.671.940.200	3.955.208.923.002	28.217.984.014	4.038.547.072.261	29.726.716.488	4.133.795.758.293	31.112.240.653	4.240.635.093.049	33.182.620.726	KEPALA BAPPENDA
Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	12	3.082.991.012													KABID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
	Laporan Pelayanan Pendapatan Daerah	Laporan	12	5.540.318.582													KABID PELAYANAN DAN PENETAPAN
	Laporan potensi dan basis data pajak daerah	Laporan	2	3.581.144.362													KABID PENDATAAN DAN PENILAIAN
	Persentase Jumlah Piutang yang Tertagih	%	100	12.181.946.785													KABID PENAGIHAN KEBERATAN PENGEMBANGAN
	Persentase peningkatan kualitas perencanaan dan Realisasi Regulasi serta Pengelolaan Sistem Informasi	%	-	-	100	4.095.618.329	100	5.137.019.562	100	5.393.870.540	100	5.696.175.158	100	5.880.172.256	100	6.274.180.869	KABID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	82,5	5.318.728.203	83	5.594.215.436	83,5	5.473.926.208	85	5.769.363.245	87,5	6.057.831.408	90	6.460.722.978	KABID PELAYANAN DAN PENETAPAN
	Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah	%	-	-	5,36	5.452.199.954	6,33	6.899.895.128	7,94	6.615.705.487	9,19	6.989.972.216	10,10	7.339.470.827	10,70	7.871.212.408	KABID PENDATAAN DAN PENILAIAN
	Persentase Capaian Pelayanan Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan	%	-	-	100	10.830.682.891	100	11.040.810.074	100	10.734.481.780	100	11.271.205.869	100	11.834.766.162	100	12.576.504.470	KABID PENAGIHAN KEBERATAN PENGEMBANGAN
Sub Kegiatan :																	
1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	13	292.033.010	13	245.547.392	13	341.917.522	13	359.013.398	13	409.575.159	13	430.053.917	13	451.556.613	Subbid Perencanaan
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	523.880.500	12	437.674.350	12	697.612.050	12	732.492.653	12	769.117.285	12	807.573.149	12	847.951.807	Subbid Pengembangan
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	869.639.884	12	1.464.224.558	12	1.737.225.948	12	1.824.087.245	12	1.915.291.608	12	2.011.056.188	12	2.111.608.997	Subbid Pengembangan
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	1.176.538.538	3	1.624.355.619	3	2.017.922.067	3	2.118.818.170	3	2.224.759.078	3	2.235.185.373	3	2.396.944.642	Sub Koord.PSI

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	0	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	2.354.767.696	12	3.861.223.293	12	4.834.015.979	12	4.446.532.380	12	4.668.858.999	12	4.902.301.949	12	5.276.109.056	Subbid Pendataan
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah Pada 10 Upt Pajak Daerah Kelas A (setiap Upt 2 Laporan)	Laporan	20		20	662.137.425	20	1.105.543.802	20	1.160.820.992	20	1.218.862.042	20	1.279.805.144	20	1.343.795.401	10 Upt Pajak Daerah Kelas A
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12		12	401.906.018	12	401.902.608	12	421.997.738	12	486.579.080	12	510.908.034	12	536.453.436	Kelompok Substansi Pengolahan Data
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Diseuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	6.000		15.000	526.933.218	20.000	558.432.739		586.354.376	25.000	615.672.095	25.000	646.455.699	25.000	714.854.514	Subbid Penilaian
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.427.809.527	12	1.185.021.362	12	1.225.002.202	12	1.286.252.312	12	1.350.564.928	12	1.418.093.174	12	1.488.997.833	Subbid Penetapan
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan			200.000	3.697.060.436	202.000	2.200.282.380	204.020	1.910.296.499	206.060	2.005.811.324	208.121	2.106.101.890	210.202	2.311.406.985	Subbid Pelayanan
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan	4.800		4.800		4.800	163.875.544	4.800	172.069.321	4.800	202.413.514	4.800	212.534.190	4.800	223.160.899	UPT Sukaraja
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan	2.400		2.400		2.400	224.930.784	2.400	236.177.323	2.400	247.986.189	2.400	260.385.498	2.400	273.404.773	UPT Gunung Putri
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan	2.100		2.100		2.100	99.999.605	2.100	104.999.585	2.100	110.249.564	2.100	115.762.042	2.100	121.550.145	UPT Jonggol
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan	1.680		1.680		1.680	139.742.355	1.680	146.729.473	1.680	154.065.946	1.680	161.769.244	1.680	169.857.706	UPT Parung
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan	3.600		3.600		3.600	99.999.272	3.600	104.999.235	3.600	110.249.197	3.600	115.761.657	3.600	121.549.740	UPT Ciawi
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan	210		210		210	249.969.826	210	262.468.317	210	275.591.733	210	289.371.320	210	303.839.886	UPT Caringin
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan	1.644		1.644		1.644	199.999.697	1.644	209.999.682	1.644	220.499.666	1.644	231.524.650	1.644	243.100.882	UPT Citeureup
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan	850		850		850	140.886.390	850	147.930.710	850	155.327.245	850	163.093.608	850	171.248.288	UPT Ciomas
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigugur)	Layanan	1.400		1.400		1.400	149.528.301	1.400	157.004.716	1.400	164.854.952	1.400	173.097.699	1.400	181.752.584	UPT Cigugur
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan	6.300		6.300		6.300	189.933.702	6.300	199.430.387	6.300	209.401.907	6.300	219.872.002	6.300	230.865.602	UPT Leuwiliang
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	80.000		90.000	436.646.405	100.000	510.065.379	100.000	535.568.648	110.000	562.347.080	110.000	590.464.434	120.000	619.987.656	Kelompok Substansi Verifikasi

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	0	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	5.091	9.555.249.843	12	8.971.178.667	12	1.804.997.280	12	1.525.148.096	12	1.601.405.501	12	1.681.475.776	12	1.765.549.565	Subbid Penagihan
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Pada 10 Upt Pajak Daerah Kelas A (setiap Upt 12 Dokumen)	Dokumen	120		120		120	7.384.671.629	120	7.400.000.000	120	7.770.000.000	120	8.158.500.000	120	8.566.425.000	10 Upt Pajak Daerah Kelas A
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	6.594	1.027.643.354	12	783.350.004	12	774.987.421	12	813.736.792	12	854.423.631	12	897.144.813	12	1.042.002.053	Subbid Keberatan
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	20	1.509.824.088	2	985.109.453	2	985.109.085	2	900.000.000	2	945.000.000	2	992.250.000	2	1.041.862.500	Kelompok Substansi Evaluasi & Pengawasan Pendapatan Daerah
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	89.229.500	4	91.044.767	4	91.044.659	4	95.596.892	4	100.376.737	4	105.395.574	4	160.665.352	Kelompok Substansi Evaluasi & Pengawasan Pendapatan Daerah
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	220.899.080	2	323.816.410	2	342.341.975	2	359.459.074	2	377.432.027	2	396.303.629	2	466.118.810	Subbid Perencanaan
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	178.160.651.039		198.099.311.616		221.346.229.495		217.841.705.931		229.489.060.177		240.185.251.208		256.168.502.414	SEKRETARIAT
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat			BB		BB		BB		BB		BB		BB		SEKRETARIAT
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	18														Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
	Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	%		1.196.643.236	100	2.003.672.668	100	2.233.000.000	100	2.344.650.000	100	2.461.882.500	100	2.584.976.625,00	100	3.029.303.750,00	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
Sub Kegiatan :																	
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	117.846.200	4	219.110.559	4	230.000.000	4	241.500.000	4	253.575.000	4	266.253.750	4	350.000.000	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	203.688.750	1	211.904.396	1	220.000.000	1	231.000.000	1	242.550.000	1	254.677.500	1	300.000.000	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	126.145.550	1	160.204.037	1	170.000.000	1	178.500.000	1	187.425.000	1	196.796.250	1	250.000.000	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	50.114.500	2	175.435.282	2	200.000.000	2	210.000.000	2	220.500.000	2	231.525.000	2	300.000.000	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	138.011.850	2	298.145.855	2	330.000.000	2	346.500.000	2	363.825.000	2	382.016.250	2	450.000.000	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	98.056.000	4	228.500.368	4	330.000.000	4	346.500.000	4	363.825.000	4	382.016.250	4	450.000.000	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan



Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	0	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	462.780.386	4	566.445.934	4	600.000.000	4	630.000.000	4	661.500.000	4	694.575.000	4	729.303.750	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen			1	143.926.237	1	153.000.000	1	160.650.000	1	168.682.500	1	177.116.625	1	200.000.000	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan dan laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen	7	159.382.594.765		167.348.161.839		177.946.695.725		172.272.195.473		181.641.074.196		189.944.865.928		203.101.019.576	Sub Bagian Keuangan
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%			100			100		100		100		100		100	Sub Bagian Keuangan
Sub Kegiatan :																	
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	210/12	158.427.149.577	183	166.514.514.058	183/12	176.959.979.734	183/12	171.301.795.292	183/12	180.622.154.007	183/12	188.874.999.729	183/12	201.977.660.067	Sub Bagian Keuangan
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.100	679.279.888	1.100	378.712.524	1100	443.477.724	1100	400.000.000	1100	420.000.000	1100	441.000.000	1100	463.050.000	Sub Bagian Keuangan
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	67.019.600	14	78.499.454	14	105.572.592	14	110.851.222	14	116.393.783	14	122.213.472	14	128.324.146	Sub Bagian Keuangan
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	52.158.200	1	107.349.697	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625	1	127.628.156	Sub Bagian Keuangan
5. Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		-	0	-				-		-		-		-	Sub Bagian Keuangan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	49	81.029.800	48	173.173.809	48	208.223.240	48	218.634.402	48	229.566.122	48	241.044.428	48	253.096.650	Sub Bagian Keuangan
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	75.957.700	1	95.912.297	1	124.442.435	1	130.664.557	1	137.197.785	1	144.057.674	1	151.260.558	Sub Bagian Keuangan
Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		0	100	225.547.232	100	227.304.865	100	238.670.109	100	250.603.614	100	263.133.795	100	276.290.484	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan :																-	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0	1	78.242.113	1	80.000.000	1	84.000.000	1	88.200.000	1	92.610.000	1	97.240.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen		0	12	147.305.119	12	147.304.865	12	154.670.109	12	162.403.614	12	170.523.795	12	179.049.984	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Baik	Dokumen	12	2.164.152.296		1.679.157.859		2.004.797.375		2.105.037.244		2.210.289.106		2.320.803.561		2.436.843.739	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%			100			100		100		100		100		100	

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	0	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan :																	
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	58.500.000	4	94.696.875	1	100.669.875	1	105.703.369	1	110.988.537	1	116.537.964	1	122.364.862	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	101.000.000	60	16.650.000	110	39.127.500	110	41.083.875	110	43.138.069	110	45.294.972	110	47.559.721	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	680.185.596	2	724.750.689	2	850.000.000	2	892.500.000	2	937.125.000	2	983.981.250	2	1.033.180.313	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	125.980.000	4	155.528.469	4	165.000.000	4	173.250.000	4	181.912.500	4	191.008.125	4	200.558.531	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	88.372.800	12	353.646.653	12	350.000.000	12	367.500.000	12	385.875.000	12	405.168.750	12	425.427.188	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	331	1.024.450.000	10	85.500.000	10	170.000.000	10	178.500.000	10	187.425.000	10	196.796.250	10	206.636.063	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	200	35.582.300	185	119.765.061	185	150.000.000	185	157.500.000	185	165.375.000	185	173.643.750	185	182.325.938	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	200	50.081.600	200	128.620.112	200	180.000.000	200	189.000.000	200	198.450.000	200	208.372.500	200	218.791.125	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	5.633.886.878		8.801.953.955		11.883.621.764		12.477.802.853		13.101.692.995		13.756.777.645		14.444.616.527	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%			100		100		100		100		100		100		
Sub Kegiatan :																	
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	216.798.700	1	185.228.865	1	250.228.965	1	262.740.413	1	275.877.434	1	289.671.306	1	304.154.871	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	3.092.648.100	6	5.524.450.717	6	7.412.220.525	6	7.782.831.551	6	8.171.973.129	6	8.580.571.785	6	9.009.600.375	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Paket	20	-	20		20	150.342.840	20	157.859.982	20	165.752.981	20	174.040.630	20	182.742.662	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	269.984.800	1	309.059.592	1	400.000.000	1	420.000.000	1	441.000.000	1	463.050.000	1	486.202.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Paket	10	-	10		10	130.625.799	10	137.157.089	10	144.014.943	10	151.215.691	10	158.776.475	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	644.781.000	6	1.691.162.225	6	2.243.218.513	6	2.355.379.438	6	2.473.148.410	6	2.596.805.831	6	2.726.646.122	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	165.130.300	1	214.969.815	1	151.708.695	1	159.294.130	1	167.258.836	1	175.621.778	1	184.402.867	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Paket	10	-	10		10	66.352.775	10	69.670.414	10	73.153.935	10	76.811.631	10	80.652.213	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	0	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11	76.500.000	2	133.554.000	2	139.553.625	2	146.531.306	2	153.857.872	2	161.550.765	2	169.628.303	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	843.989.878	2	407.007.500	2	155.226.000	2	162.987.300	2	171.136.665	2	179.693.498	2	188.678.173	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	20	-	20		20	478.154.780	20	502.062.519	20	527.165.645	20	553.523.927	20	581.200.124	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	324.054.100	12	336.521.241	12	305.989.248	12	321.288.710	12	337.353.146	12	354.220.803	12	371.931.843	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Dokumen	12	1.096.000.000		5.422.926.970		14.810.426.489		15.550.947.813		16.328.495.204		17.144.919.964		18.002.165.962	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%			100		100		100		100		100		100		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan :																	
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0		8	1.734.880.050	8	2.396.736.725	8	2.516.573.561	8	2.642.402.239	8	2.774.522.351	8	2.913.248.469	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0		7	2.302.441.920	3	1.889.342.012	3	1.983.809.112	3	2.082.999.568	3	2.187.149.546	3	2.296.507.023	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		1	288.605.000	1	8.567.347.626	1	8.995.715.008	1	9.445.500.758	1	9.917.775.796	1	10.413.664.586	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		1	1.097.000.000	1	1.957.000.126	1	2.054.850.132	1	2.157.592.639	1	2.265.472.271	1	2.378.745.884	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Unit	1	190.000.000			1		1		1		1		1		UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja
	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Parung)	Unit	1	211.000.000			1		1		1		1		1		UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Unit	1	154.000.000			1		1		1		1		1		UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Unit	1	200.000.000			1		1		1		1		1		UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin
	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Unit	1	181.000.000			1		1		1		1		1		UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	0	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Unit	1	160.000.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang perangkat daerah	Laporan	12	5.745.281.590	8.748.084.410	9.226.410.540	9.687.731.067	10.172.117.620	10.680.723.501	11.214.759.676	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						
	Pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah terlaksana dengan baik	%		100	100	100	100	100	100	100							
Sub Kegiatan :																	
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.969.294.166	12	4.201.154.108	12	3.880.702.200	12	4.074.737.310	12	4.278.474.176	12	4.492.397.884	12	4.717.017.778	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan	120	0	120	120	555.648.940	120	583.431.387	120	612.602.956	120	643.233.104	120	675.394.759	10 Upt Pajak Daerah Kelas A	
2. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan	10	92.980.000	10	96.984.750	10	98.092.500	10	102.997.125	10	108.146.981	10	113.554.330	10	119.232.047	10 Upt Pajak Daerah Kelas A
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.683.007.424	2	4.449.945.552	2	1.958.029.432	2	2.055.930.904	2	2.158.727.449	2	2.266.663.821	2	2.379.997.012	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan	120	-	120	120	2.733.937.468	120	2.870.634.341	120	3.014.166.058	120	3.164.874.361	120	3.323.118.079	10 Upt Pajak Daerah Kelas A	
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang terfasilitasi	Laporan	12	2.942.092.274	3.869.806.683	3.013.972.736	3.164.671.373	3.322.904.942	3.489.050.189	3.663.502.698	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Sub Kegiatan :																	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	109.866.284	9	181.680.000	9	298.672.600	9	313.606.230	9	329.286.542	9	345.750.869	9	363.038.412	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	110	947.993.524	110	1.229.700.000	110	1.078.202.000	110	1.132.112.100	110	1.188.717.705	110	1.248.153.590	110	1.310.561.270	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	287	840.704.485	8	852.735.949	8	544.787.744	8	572.027.131	8	600.628.488	8	630.659.912	8	662.192.908	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	Unit	1	18.113.000	1	55.500.000	1	55.179.152	1	57.938.110	1	60.835.015	1	63.876.766	1	67.070.604	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	0	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5. Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi Lainnya	Unit	7	714.124.581	5	832.957.040	5	349.948.000	5	367.445.400	5	385.817.670	5	405.108.554	5	425.363.981	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi Lainnya	Unit	3	311.290.400	3	717.233.694	3	687.183.240	3	721.542.402	3	757.619.520	3	795.500.498	3	835.275.521	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
TOTAL				202.547.051.780		223.796.540.993		250.018.169.695		246.059.689.945		259.215.776.662		271.297.491.860		289.351.123.137	

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dapat digambarkan melalui ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU juga dapat membantu dalam memantau kemajuan perangkat daerah dalam mencapai tujuannya, mengidentifikasi area mana yang perlu ditingkatkan, serta IKU juga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Oleh karena itu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor telah menyusun target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut tersaji dalam tabel 4.4 (Terlampir).

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio PAD Terhadap APBD	%	45,13	44,51	44,17	43,24	42,42	41,56
2	Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	%	33,48	32,33	31,33	30,42	29,47	28,54
3	Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD	%	9,77	10,31	11,07	11,12	11,33	11,47

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Jumlah Pajak Daerah	Rupiah	3.817.688.382.057	3.852.645.892.463	3.955.208.923.002	4.038.547.072.261	4.133.795.758.293	4.240.635.093.049	

BAB V

PENUTUP

Demikian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selama lima tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2025-2030 sebagai implementasi kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.



LAMPIRAN

RUMUS HITUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN UNDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD Terhadap APBD	%	Jumlah Target PAD dibagi jumlah target APBD		5.145.530.165.866/ 11.401.275.517.519*100	5.303.511.989.200/ 11.916.445.321.703*100	5.575.921.837.910/ 12.625.026.439.130*100	5.740.380.475.909/ 13.275.869.617.078*100	5.951.061.102.434/ 14.029.033.808.227*100	6.175.663.511.214/ 14.858.796.376.787*100
	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	%	Jumlah Target Pajak Daerah dibagi jumlah target APBD		3.817.688.382.057/ 11.401.275.517.519*100	3.852.645.892.463/ 11.916.445.321.703*100	3.955.208.923.002/ 12625026439130*100	4.038.547.072.261/ 13.275.869.617.078*100	4.133.795.758.293/ 14.029.033.808.227*100	4.240.635.093.049/ 14.858.796.376.787*100
	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD	%	Jumlah Target Retribusi Daerah dibagi jumlah target APBD		1.114.144.878.174/ 11.401.275.517.519*100	1.229.137.219.190/ 11.916.445.321.703*100	1.397.483.997.306/ 12.625.026.439.130*100	1.476.339.162.290/ 13.275.869.617.078*100	1.589.760.343.833/ 14.029.033.808.227*100	1.704.700.679.894/ 14.858.796.376.787*100
	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pajak Daerah	Rupiah	Jumlah Pajak Daerah		3.817.688.382.057	3.852.645.892.463	3.955.208.923.002	4.038.547.072.261	4.133.795.758.293	4.240.635.093.049
	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan kualitas perencanaan dan Realisasi Regulasi serta Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	%	Rata-rata persentase capaian kinerja sub kegiatan perencanaan, sub kegiatan pengembangan dan sub kegiatan pengelolaan sistem informasi		100	100	100	100	100	100
		Persentase Capaian Layanan Pajak Daerah yang sesuai Prosedur	%	Rata-rata persentase capaian kinerja sub kegiatan pelayanan, sub kegiatan penetapan dan sub kegiatan verifikasi		82,5	83	83,5	85	87,5	90
		Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah	%	(Jumlah Potensi Pajak Tahun n - Jumlah Potensi Pajak Tahun n-1) / Jumlah Potensi Pajak Tahun n-1 * 100%		241.196.588.632/ 4.498.241.111.473*100	300.000.000.000/ 4.739.437.700.105*100	400.000.000.000/ 5.039.437.700.105*100	500.000.000.000/ 5.439.437.700.105*100	600.000.000.000/ 5.939.437.700.105*100	700.000.000.000/ 6.539.437.700.105*100
		Persentase Capaian Pelayanan Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan Pendapatan Daerah	%	Rata-rata persentase capaian kinerja sub kegiatan Pelayanan Penagihan, sub kegiatan Keberatan dan sub Kegiatan Pengawasan Pendapatan Daerah		100	100	100	100	100	100

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sub Kegiatan :										
	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		13	13	13	13	13	13
	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		12	12	12	12	12	12
	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		12	12	12	12	12	12
	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		3	3	3	3	3	3
	5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Sukaraja)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)		2	2	2	2	2	2

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Jonggol)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Parung)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Parung)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciawi)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Caringin)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Caringin)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Citeureup)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciomas)		2	2	2	2	2	2

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Cigudeg)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)		2	2	2	2	2	2
	6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		12	12	12	12	12	12
	7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		12	12	12	12	12	12
	9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)		4800	4800	4800	4800	4.800	4800
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)		2400	2400	2400	2400	2.400	2400

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)		2100	2100	2100	2100	2.100	2100
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)		1680	1680	1680	1680	1.680	1680
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)		3600	3600	3600	3600	3.600	3600
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)		210	210	210	210	210	210
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)		1644	1644	1644	1644	1.644	1644
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)		850	850	850	850	850	850
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)		1400	1400	1400	1400	1.400	1400
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)		6300	6300	6300	6300	6.300	6300
	10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		90.000	100.000	100.000	110.000	110.000	120.000
	11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		12	12	12	12	12	12

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Sukaraja)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Jonggol)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Parung)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Parung)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciawi)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Caringin)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Caringin)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Citeureup)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciomas)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Cigudeg)		12	12	12	12	12	12

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)		12	12	12	12	12	12
	12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		12	12	12	12	12	12
	13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen laporan		2	2	2	2	2	2
	14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		4	4	4	4	4	4
	15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		2	2	2	2	2	2
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai AKIP	Predikat	Hasil Penilaian dari Inspektorat		BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	%	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun ----- x 100 Total target Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja PD		18/18*100	18/18*100	18/18*100	18/18*100	18/18*100	18/18*100
	Sub Kegiatan :										
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	4	4	4	4	4

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	1	1	1	1	1
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	1	1	1	1	1
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2	2	2	2	2	2
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2	2	2	2	2	2
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4	4	4	4	4	4
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	4	4	4	4	4

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	1	1	1	1	1
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	Realisasi Anggaran ----- x 100 Pagu Anggaran		100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan :										
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		183/12	183/12	183/12	183/12	183/12	183/12
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1100	1100	1100	1100	1100	1100
	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		14	14	14	14	14	14
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	1	1	1	1
	5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0	0	0	0	0	0

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		48	48	48	48	48	48
	7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	1	1	1	1	1
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	Jumlah Barang Milik Daerah yang digunakan ----- x 100 Total Barang Milik Daerah		2/2*100	2/2*100	2/2*100	2/2*100	2/2*100	2/2*100
	Sub Kegiatan :										
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	1	1	1	1	1
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12	12	12	12	12	12
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani Tepat Waktu ----- x 100 Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani		178/178*100	178/178*100	178/178*100	178/178*100	178/178*100	178/178*100

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sub Kegiatan :										
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		4	1	1	1	1	1
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		60	110	110	110	110	110
	3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2	2	2	2	2	2
	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		4	4	4	4	4	4
	5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12	12	12	12	12	12
	6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10	10	10	10	10	10
	7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		185	185	185	185	185	185
	8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		200	200	200	200	200	200

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	Jumlah Jasa Pelayanan yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan ----- x 100 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang ditargetkan		8/8*100	8/8*100	8/8*100	8/8*100	8/8*100	8/8*100
	Sub Kegiatan :										
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1	1	1	1	1
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6	6	6	6	6	6
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Sukaraja)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Gunung Putri)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Jonggol)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Parung)		2	2	2	2	2	2

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Ciawi)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Caringin)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Citeureup)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Ciomas)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Cigudeg)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Leuwiliang)		2	2	2	2	2	2
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1	1	1	1	1

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Sukaraja)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Gunung Putri)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Jonggol)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Parung)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Ciawi)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Caringin)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Citeureup)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Ciomas)		1	1	1	1	1	1

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Cigudeg)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Leuwiliang)		1	1	1	1	1	1
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6	6	6	6	6	6
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Sukaraja)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Gunung Putri)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Jonggol)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Parung)		1	1	1	1	1	1

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Ciawi)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Caringin)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Citeureup)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Ciomas)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Cigudeg)		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Leuwiliang)		1	1	1	1	1	1
	6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		2	2	2	2	2	2
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	2	2	2	2	2

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Sukaraja)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Gunung Putri)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Jonggol)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Parung)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Ciawi)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Caringin)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Citeureup)		2	2	2	2	2	2

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Ciomas)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Cigudeg)		2	2	2	2	2	2
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Leuwiliang)		2	2	2	2	2	2
	8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12	12	12	12	12	12
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan ----- x 100 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana		7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100
	Sub Kegiatan :										
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		8	8	8	8	8	8

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		7	3	3	3	3	3
	3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1	1	1	1	1
	4. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Unit	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Parung)	Unit	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Parung		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Unit	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Unit	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin		1	1	1	1	1	1

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Unit	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg		1	1	1	1	1	1
		Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Unit	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang		1	1	1	1	1	1
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Jumlah Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan ----- x 100 Jumlah Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100	3/3*100
	Sub Kegiatan :										
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Sukaraja)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Gunung Putri)		12	12	12	12	12	12

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Jonggol)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Parung)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Ciawi)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Caringin)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Citeureup)		12	12	12	12	12	12

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Ciomas)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Cigudeg)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Leuwiliang)		12	12	12	12	12	12
	2. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Sukaraja)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Gunung Putri)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Jonggol)		12	12	12	12	12	12

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Parung)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Ciawi)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Caringin)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Citeureup)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Ciomas)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT Cigudeg)		12	12	12	12	12	12

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Leuwiliang)		12	12	12	12	12	12
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Sukaraja)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Gunung Putri)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Jonggol)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Parung)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Ciawi)		12	12	12	12	12	12

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Caringin)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Citeureup)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Ciomas)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Cigudeg)		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Leuwiliang)		12	12	12	12	12	12
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	Jumlah Barang Milik Daerah yang sudah Terpelihara dengan Baik ----- x 100 Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimiliki		6/6*100	6/6*100	6/6*100	6/6*100	6/6*100	6/6*100
	Sub Kegiatan :										

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		9	9	9	9	9	9
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		110	110	110	110	110	110
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8	8	8	8	8	8
	4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1	1	1	1	1	1
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5	5	5	5	5	5
	6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	3	3	3	3	3